

**bangga
melayani
bangsa**



Pemkab. Karanganyar

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

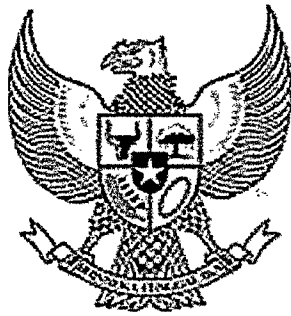
RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

**DINAS PERTANIAN
PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029**

Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar Kode Pos 57712
Telp. (0271) 495142, 494801, Fax (0271) 494801
<https://dispertanpp.karanganyarkab.go.id> | email : dispertanpp@karanganyar.go.id

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029**



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian terkait dan Rencana Strategis Dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, rencana program, indikator program, rencana kegiatan, indikator kegiatan, rencana sub kegiatan, indikator sub kegiatan, kebijakan, serta anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2025-2029 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Karanganyar, 13 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



E. WIHARTOMO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 19710909 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-5
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-20
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan	II-20
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-13
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
2.2.2 Isu Strategis	II-22
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	III-28
3.2.1 Strategi.....	III-28
3.2.2 Arah Kebijakan.....	III-31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	IV-1
4.2. Indikator Kinerja Utama.....	IV-56
4.3. Indikator Kinerja Kunci.....	IV-60
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pedoman Transisi.....	V-1
5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko.....	V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Bagan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	I-1
Gambar 2. 1.	Struktur Organisasi Dispertan PP Kabupaten Karanganyar	II-2
Gambar 4. 1.	Pohon Kinerja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 1).....	IV-44
Gambar 4. 2.	Pohon Kinerja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 2).....	IV-45
Gambar 4. 3.	Pohon Kinerja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 3).....	IV-46
Gambar 4. 4.	Pohon Kinerja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 4).....	IV-47
Gambar 4. 5.	Pohon Kinerja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 5).....	IV-48
Gambar 4. 6.	Pohon Kinerja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 6).....	IV-49
Gambar 4. 7.	Pohon Kinerja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 7).....	IV-50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Jumlah Pegawai Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	II-5
Tabel 2. 2.	Jumlah Pegawai Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Golongan Tahun 2025 .	II-5
Tabel 2. 3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.....	II-6
Tabel 2. 4.	Pertumbuhan Kinerja Indikator Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024.....	II-12
Tabel 2. 5.	Capaian Kinerja Indikator Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024	II-18
Tabel 2. 6.	Capaian Kinerja Keuangan Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024	II-20
Tabel 2. 7.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-22
Tabel 2. 8.	Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dispertan PP .	II-23
Tabel 3. 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.....	III-2
Tabel 3. 2.	Cascading Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	III-7
Tabel 3. 3.	Tahapan Rencana Strategis.....	III-28
Tabel 3. 4.	Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD	III-30
Tabel 4. 1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra.....	IV-7
Tabel 4. 2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	IV-20
Tabel 4. 3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-48
Tabel 4. 4.	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota	IV-51
Tabel 4. 5.	Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Dispertan PP	IV-54
Tabel 4. 6.	Indikator Kinerja Kunci.....	IV-57

BAB I
PENDAHULUAN

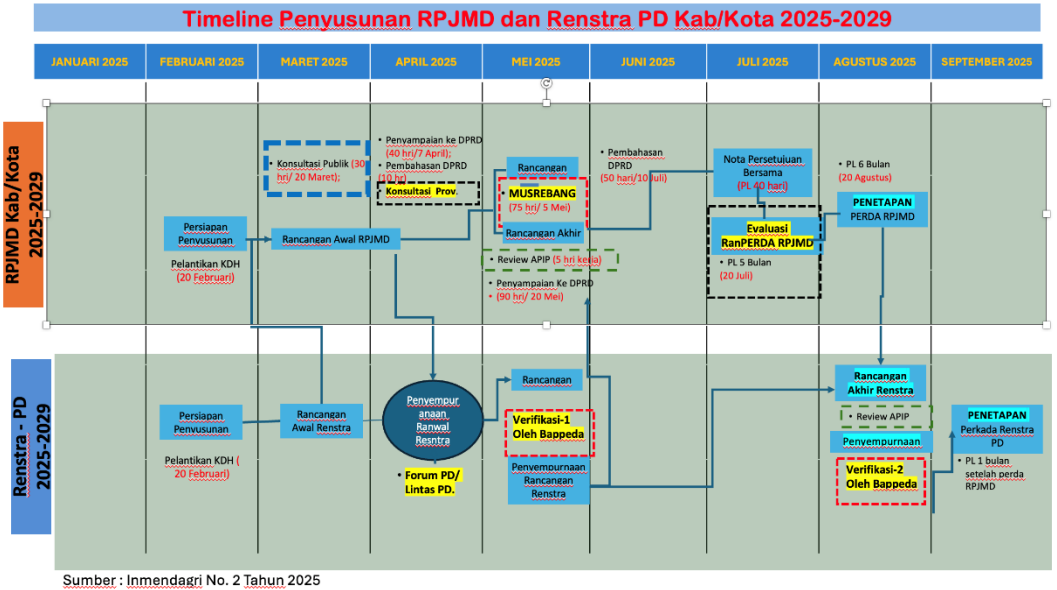
1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (Dispertan PP) Kabupaten Karanganyar untuk periode 2025–2029 merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program, sekaligus merepresentasikan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal penguatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Dasar hukum penyusunan Renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan perlunya perencanaan pembangunan yang terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra ini juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut Renstra. Renstra berperan sebagai instrumen strategis jangka menengah yang memuat arah, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas perangkat daerah.

Penyusunan dokumen ini juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya keselarasan antara Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 menjadi bentuk operasional dari visi dan misi kepala daerah terpilih melalui Pilkada serentak tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah. Proses penyusunannya dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yang dapat digambarkan dalam bagan alir berikut.



Gambar 1.1
Bagan Tahapan Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Dispertan PP Karanganyar 2025–2029 juga dirancang sejalan dengan dokumen-dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Kabupaten Karanganyar, serta kebijakan nasional yang berkaitan dengan investasi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dispertan PP Karanganyar untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, memiliki daya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dan sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dispertan PP Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dispertan PP Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dispertan PP.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispertan PP Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika

Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah, bab ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; kelompok sasaran layanan. Permasalahan dan Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran , Strategi Dan Arah Kebijakan, bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, bab ini memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Bab V Penutup, bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

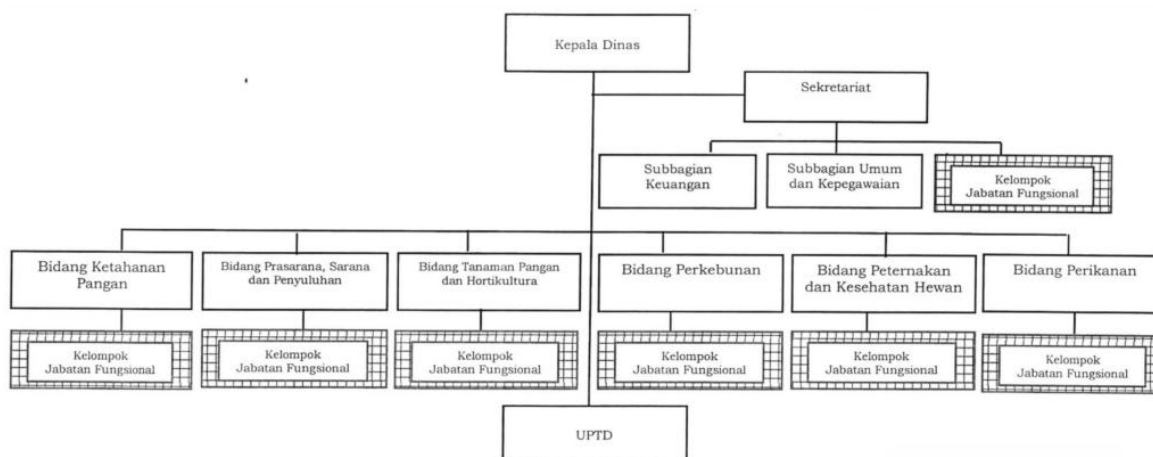
Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan.

1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Perikanan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Disperten PP Kabupaten Karanganyar

2. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian kegiatan;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja,
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian;
- 4) pengkoordinasian tata laksana;

- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

d. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perkebunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perkebunan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan;
- 3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- 3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan

- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

g. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan;
- 3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

h. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perikanan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- 3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD adalah Unit Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Jumlah jabatan Fungsional di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang bekerja di Dispertan PP Kabupaten Karanganyar sebanyak 237 orang, yang terdiri atas PNS sebanyak 96 orang, PPPK sebanyak 56 orang dan Non ASN sebanyak 83 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 41 orang berpendidikan SMA, 41 orang D3, 139 orang S1, 15 orang S2 dan 1 orang S3. Rincian lengkap mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		NON ASN (THL)		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	6	2	13	1	17	2	41
3	D3	13	5	4	5	11	3	41
4	S1	24	36	30	12	20	17	139
5	S2	7	7	0	0	1	0	15
6	S3	0	1	0	0	0	0	1
	Jumlah	50	51	47	18	49	22	237

Sumber : Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
(Data per September 2025)

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
	PNS			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	9	5	14
3	Golongan III	30	37	67
4	Golongan IV	11	9	20
	PPPK			
5	Golongan V	13	1	14
6	Golongan VII	5	3	8
7	Golongan IX	30	12	42

Sumber : Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
(Data per September 2025)

Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa komposisi sumber daya manusia di Dispertan PP cukup beragam dari sisi jenjang pendidikan. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan S1, yaitu sebanyak 139 orang,

2. Sarana dan Prasarana

Upaya untuk mencapai target kinerja diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, berikut kondisi sarana dan prasarana di Dispertan PP Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.3.

**Jumlah Sarana dan Prasarana Dispertan PP
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	A.C. Sentral	unit	1		1
2	A.C. Split	unit	6	2	8
3	A.C. Window	unit	10	3	13
4	Alat Kedokteran lainnya	buah	1	0	1
5	Alat Kedokteran umum lainnya	buah	25	2	27
6	alat laboratorium film lainnya (dst)	buah	1		1
7	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	buah	5	11	16
8	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	buah	3		3
9	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	buah	1		1
10	alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan lainnya (dst)	buah	5		5
11	alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	buah	1		1
12	alat pasca panen lainnya (dst)	unit	14		14
13	Alat Pemadam/Portable	buah	10		10
14	Alat Pendingin lainnya	buah	6	2	8
15	Alat Pengambil Sample Tanah	buah	2		2
16	alat pengangkat lainnya (dst)/Kerangka Harpa	unit	2		2
17	Alat Penggiling Padi	unit	2		2
18	Alat Penghancur Kertas	unit		1	1
19	Alat Pengolahan lainnya	unit	7	4	11
20	Alat Pengukur Kadar Air	buah	1		1
21	Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)	buah	1		1
22	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	buah	3		3
23	Alat Pengukur Temperatur	buah	1		1
24	Alat Peternakan lainnya	buah	29		29
25	Alat Produksi Perikanan lainnya/penangkar benih ikan	buah	1		1
26	Alat Prosesing lainnya	unit	3		3
27	Alat Rumah Tangga Lain-lain	buah	2	13	15
28	Alat Studio Lainnya/Power Mixer	unit	3		3
29	alat timbangan/biara lainnya (dst)	unit	2		2
30	Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)	buah	2		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
31	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	buah	4		4
32	alat ukur lain-lain lainnya (dst)/Alat ukur sapi	buah	4		4
33	Analytical Balance Electric	buah	3		3
34	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	buah		43	43
35	Autoclave Unit (Alat Lab. Micro Biologi Teknik Penyehatan)	buah	2		2
36	Autocleve	buah	1		1
37	Automatic Pipet Dispenser	buah	2		2
38	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Mikrobiologi)	unit	1		1
39	Buret/Peralatan Titrasi	buah	3		3
40	Container	buah	42		42
41	Container N2 Cair (Alat Laboratorium Pertanian)	buah	1		1
42	D.O. Meter	buah	2		2
43	Dissetting Set	buah	2		2
44	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	buah	3	1	4
45	Fibertec System	buah	10	26	36
46	Filing Cabinet Besi	buah	36	30	66
47	Focusing Screen/Layar LCD Projector	buah	8		8
48	Insemination Gun	buah	4		4
49	Kompur Listrik (Alat Dapur)	buah	1		1
50	Komputer Jaringan lainnya	unit	1		1
51	Kursi Besi/Metal	buah	193		193
52	Kursi Biasa	buah	8	6	14
53	Kursi Kayu	buah	6	8	14
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	buah	126		126
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	buah	1		1
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	buah	4		4
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	18	1	19
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	buah	1		1
59	Kursi Kerja Pejabat lainnya	buah	8		8
60	Kursi Lipat	buah	238	18	256
61	Kursi Putar	buah	11	2	13
62	Kursi Rapat	buah	154	67	221
63	Kursi Tamu	buah	6		6
64	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	buah	2		2
65	laboratorium kearsipan lainnya (dst)/Dek Glass	buah	8		8
66	Lap Top	unit	31	12	43
67	Layar Film/Projector	buah	31	4	35
68	Lemari Besi/Metal	buah	16	18	34

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
69	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	buah	3		3
70	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	buah	1	2	3
71	Lemari Es	buah	5	1	6
72	Lemari Kaca	buah	44	7	51
73	Lemari Kayu	buah	10	9	19
74	Lemari Penyimpan	buah	1	1	2
75	Meja 1/2 Biro	buah	14	163	177
76	Meja Kerja Besi/Metal	buah		2	2
77	Meja Kerja Kayu	buah	14	13	27
78	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	buah	120	21	141
79	Meja Kerja Pejabat Eselon II	buah	3	2	5
80	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah	9		9
81	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	7		7
82	Meja Kerja Pejabat lain-lain	buah	2		2
83	Meja Rapat	buah	32	56	88
84	Meja Resepsionis	buah	1		1
85	Meja Tamu Biasa	buah	3	2	5
86	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	buah	2		2
87	Mesin Fotocopy Folio	unit	1		1
88	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	unit	1		1
89	Mesin Pembuat Pellet	unit	2		2
90	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	unit		2	2
91	Micro Pippettes	buah	1		1
92	Microphone/Wireless MIC	buah	5		5
93	Microscope Dengan Camera	buah	1		1
94	Microscope Discecting	buah	1		1
95	Mikroskop	buah	2		2
96	Monitor	unit	4		4
97	Note Book	unit	40	35	75
98	Overhead Projector	unit	2	3	5
99	P.C Unit	unit	22	10	32
100	Papan Nama Instansi	buah	18		18
101	Papan Tulis	buah	5		5
102	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	buah	3		3
103	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	buah	1	4	5
104	Peralatan Ubinan	unit	10		10
105	Permanent Magnet Kit	buah	1		1
106	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	buah	6	7	13
107	PH Meter (Alat Ukur Universal)	buah	1		1
108	Pick Up	unit	5		5
109	Pompa Air	unit	8	16	24

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
110	pompa lainnya (dst)	unit	2		2
111	Pompa Peristaltik	unit	4		4
112	Portable Generating Set	unit	4		4
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	112	6	118
114	Rak Besi	buah	6		6
115	Rak Kayu	buah	31		31
116	Rak Peralatan	buah	1		1
117	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	unit	4	3	7
118	Sepeda Motor	unit	127		127
119	Slide Projector	buah	3		3
120	Sofa	unit		1	1
121	Sound System	unit		7	16
122	Station Wagon	unit	11		11
123	Tablet PC	unit	1		1
124	Telephone Mobile	buah	1		1
125	Televisi	unit	12	7	19
126	Timbangan Barang	unit	5		5
127	Timbangan Elektronik	unit	2		2
128	Unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya lainnya (dst)	unit	1	1	2
129	Waight Band	unit	5		5
130	Water Test	buah	2		2
131	White Board	buah	18	8	26
132	Wireless	buah	15	5	20
133	Wireless Amplifier	unit		1	1

Sumber : Sekretariat Dispartan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dispartan PP adalah unsur pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian, pangan dan perikanan. Kepala Dispartan sebagaimana mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengkoordinasi pencapaian pertanian, pangan dan perikanan.

Berdasarkan data kinerja tabel 2.4, sektor pertanian yang tersaji, kinerja sektor pertanian menunjukkan tren yang beragam dengan beberapa pencapaian positif dan tantangan yang perlu diatasi. Kontribusi pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan konsisten dari 13,26% pada 2020 menjadi 12,1% pada 2023, namun Pola Pangan Harapan menunjukkan peningkatan signifikan mencapai 97,41 pada 2024. Indeks Ketahanan Pangan juga membaik dari 87,22 menjadi 88,75, sementara Angka Konsumsi Ikan meningkat dari 20,26 menjadi 23,61. Produktivitas tanaman pangan utama seperti padi relatif stabil di angka 62,2 kw/ha, meskipun total produksi tanaman pangan mengalami fluktuasi.

Sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan produksi meningkat dari 2,35 juta kg pada 2020 menjadi 2,47 juta kg pada 2024. Namun, sektor peternakan menghadapi tantangan dengan penurunan drastis populasi sapi dari 68.464 ekor menjadi 55.183 ekor pada 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga sebagian peternak ada kekhawatiran untuk memelihara

ternak sapi dan beralih ke ternak kambing/domba. Di sisi positif, populasi ayam mengalami peningkatan signifikan mencapai 12,52 juta ekor. Angka kesakitan ternak menunjukkan tren peningkatan yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganan kesehatan hewan untuk mendukung keberlanjutan produksi peternakan.

Kinerja sektor pertanian periode 2020-2024 seperti tabel 2.5 menunjukkan pencapaian yang kontradiktif dengan tren penurunan kontribusi terhadap PDRB namun peningkatan kualitas produksi. Kontribusi pertanian dalam PDRB mengalami penurunan konsisten dari target 13,53% pada 2023 menjadi realisasi 12,1% dengan capaian hanya 89,43%, mencerminkan transformasi struktural ekonomi menuju sektor non-pertanian. Meskipun demikian, aspek kualitas menunjukkan perbaikan signifikan dengan Pola Pangan Harapan pada 2022 mencapai 107,34% dari target dan produktivitas hortikultura yang luar biasa hingga 155,83%. Indeks Reformasi Birokrasi pada 2023 berhasil melampaui target dengan capaian 112,63%, menunjukkan komitmen perbaikan tata kelola sektor pertanian.

Analisis mendalam data 2020-2024 mengungkap disparitas kinerja antar subsektor dengan sektor peternakan menghadapi tekanan struktural. Populasi sapi pada 2024 mengalami penurunan drastis hanya mencapai 79,68% dari target, demikian pula kelinci dengan capaian 48,30%, mengindikasikan tantangan dalam pengembangan peternakan. Sebaliknya, sektor pangan menunjukkan resiliensi dengan produksi daging pada 2023 mencapai 143,26% target dan konsumsi protein pada 2024 sebesar 123,77% target. Keberhasilan menekan desa rentan pangan pada 2024 hingga 21,71% dari baseline mencerminkan efektivitas program ketahanan pangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reorientasi strategi dari ekspansi kuantitatif menuju peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk bernilai tambah tinggi untuk periode mendatang.

Realisasi anggaran program pertanian periode 2020-2024 pada tabel 2.6, menunjukkan tingkat capaian yang sangat baik dengan rata-rata di atas 90%. Program-program strategis seperti Penanganan Kerawanan Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan mencapai realisasi sempurna 100% sepanjang periode implementasi, mencerminkan komitmen kuat terhadap ketahanan pangan. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan pada tahun 2021-2022 juga menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi 99,96% dan 100%. Namun, terdapat penurunan signifikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mengalami fluktuasi realisasi dari 91,21% pada 2020 turun hingga 85,65% pada 2021, sebelum membaik menjadi 96,70% pada 2023.

Analisis lebih mendalam mengungkap disparitas kinerja antar program yang mengindikasikan prioritas kebijakan yang berbeda. Program operasional skala kecil seperti Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi Rp 15-20 miliar berhasil direalisasikan hampir sempurna, sementara program dengan anggaran besar seperti Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian senilai Rp 22,9 miliar hanya mencapai 93,60% pada 2023. Pola ini menunjukkan tantangan dalam implementasi program berskala besar yang memerlukan koordinasi kompleks. Program Penyuluhan Pertanian memperlihatkan tren positif dengan peningkatan realisasi dari 95,57% menjadi 99,93%, mengindikasikan perbaikan kapasitas manajemen program. Secara keseluruhan, efektivitas penyerapan anggaran mencerminkan kematangan sistem perencanaan dan implementasi program pembangunan pertanian.

Tabel 2.4.
Pertumbuhan Kinerja Indikator Dispertan PP
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan Renstra 2018-2023											
1	Kontribusi Pertanian dalam PDRB	%	13,26	13,05	12,66	12,1	11,76	-1,58	-2,99	-4,42	-2,81	-2,95
2	Pola Pangan Harapan	Skor/Nilai	81,9	83,2	89,2	88,7	97,41	1,59	7,21	-0,56	9,82	4,51
	Indikator Tujuan Resntra 2024-2026											
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,87	3,57	5,87	5,53	5,82	290,91	64,43	-5,79	5,24	88,70
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,94	59	62,01	70,91	85,74	0,71	5,10	14,35	19,26	9,72
	Indikator Tujuan Renstra 2025-2029											
1	Indeks Ketahanan Pangan (Sumber Data dari Badan Pangan Nasional)	Angka	87,22	87,63	87,39	88,48	89,67	0,47	-0,27	1,25	1,34	0,70
2	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka	20,26	21,71	22,18	22,74	23,61	7,16	2,16	2,52	3,83	3,92
	Indikator Sasaran Renstra 2018-2023											
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	474870	474466	514868	482534	487862	-0,09	8,52	-6,28	1,1	0,72
2	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan (Padi)	Kw/Ha	60,44	61	62	62,2	62,2	0,93	1,64	0,32	0	0,96
3	Produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	10,19	13,36	18,7	15,9	13,95	31,11	39,97	-14,97	-12,26	18,7
4	Produktivitas Pertanian Perkebunan	Ton/Ha	0,61	0,73	0,72	0,8	0,8	19,67	-1,37	11,11	0	9,8
5	Produksi Daging	Kg	7.772.525	8.396.132	8.738.693	8.917.526	9.310.242	8,02	4,08	2,05	4,4	4,72
6	Produksi Telur	Kg	22.762.730	21.621.993	20.613.510	21.333.380	23.704.750	-5,01	-4,66	3,49	11,12	-2,06
7	Produksi susu	Liter	221.256	212.198	199.304	203.700	193.970	-4,09	-6,08	2,21	-4,78	-2,65
8	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	490.522	504.971	548.427	509.194	511.549	2,95	8,61	-7,15	0,46	1,47

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Produksi Perikanan	Kg	2.353.548	2.388.247	2.419.713	2.453.016	2.467.977	1,47	1,32	1,38	0,61	1,39
10	Nilai SAKIP	Skor	73,87	74,34	70,7	71,7	72,65	0,64	-4,9	1,41	1,32	-1,74
11	Nilai IKM	Skor	76,92	78,77	78,05	79,35	80,05	2,41	-0,91	1,67	0,88	1,05
	Indikator Sasaran Renstra 2024-2026											
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,9	83,2	89,2	88,7	97,41	1,59	7,21	-0,56	9,82	4,51
2	Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi)	Ton/Ha	6,04	6,1	6,2	6,22	6,22	0,99	1,64	0,32	0,00	0,74
3	Produktivitas Perikanan	Kg/m2	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	1,56	1,54	1,52	1,49	1,53
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,87	74,34	70,7	71,7	72,65	0,64	-4,90	1,41	1,32	-0,38
	Indikator Sasaran Renstra 2025-2029											
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,9	83,2	89,2	88,7	97,41	1,59	7,21	-0,56	9,82	4,51
2	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	2353,55	2388,25	2419,71	2453,02	2467,98	1,47	1,32	1,38	0,61	1,19
3	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun											
	- Padi	Ton/ha	6,04	6,1	6,2	6,22	6,22	0,99	1,64	0,32	0,00	0,74
	- Jagung	Ton/ha	6,8	6,64	6,99	6,83	7,1	-2,35	5,27	-2,29	3,95	1,15
	- Kacang tanah	Ton/ha	1,85	1,89	1,9	2,01	2,03	2,16	0,53	5,79	1,00	2,37
	- Ubi Kayu	Ton/ha	35,86	32	33,92	36,84	37,84	-10,76	6,00	8,61	2,71	1,64
	- Ubi jalar	Ton/ha	38,4	41,34	42,42	43,82	44,82	7,66	2,61	3,30	2,28	3,96
4	Nilai SAKIP	Nilai	73,87	74,34	70,7	71,7	72,65	0,64	-4,90	1,41	1,32	-0,38
	Indikator Program Renstra 2024-2026											
1	Angka Konsumsi Energi (AKE)	kalori/kapita/tahun	1802	1921,5	1871,2	1873,00	2201,43	6,63	-2,62	0,10	17,54	5,41
2	Angka Konsumsi Protein (AKP)	gram/kapita/tahun	50,6	54,1	54,4	52,5	69,93	6,92	0,55	-3,49	33,20	9,29

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	87,22	87,63	87,39	88,48	89,67	0,47	-0,27	1,25	1,34	0,70
4	Persentase Desa Rentan Pangan	%	28,81	14,69	14,69	11,30	2,82	49,01	0,00	23,08	75,04	36,78
5	Persentase Pelaku Usaha PSAT-PDUK yang Memiliki Sertifikat	%	-	-	22,64	32,79	36,92	-	-	44,83	21,74	33,29
6	Produksi Perikanan Budidaya	kg	1.841.880	1.871.031	1.897.814	1.925.865	1.940.692	1,58	1,43	1,48	0,77	1,32
7	Persentase Perairan Umum Daratan yang Diawasi	%	-	-	-	-	35,29	-	-	-	-	-
8	Persentase Produk Perikanan yang Dipromosikan	%	-	42	46,40	58,62	64,29	-	10,48	26,34	9,67	15,49
9	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	-	-	93,33	86,67	80	-	-	-7,14	-7,70	-7,42
10	Produksi Tanaman Pangan Utama											
	- Padi	ton	333.306	341.820	342.002	343.995	342.996	2,55	0,05	0,58	-0,29	0,72
	- Jagung	ton	21.822	27.494	23.102	24.917	27.264	25,99	-15,97	7,86	9,42	6,82
11	Produksi Hortikultura Unggulan											
	- Jahe	ton	424,3	586,3	436,4	436,3	573,9	38,18	-25,57	-0,02	31,54	11,03
	- Buah Durian	ton	5844,9	8886,5	13435	10627,9	11715,6	52,04	51,18	-20,89	10,23	23,14
12	Produksi Perkebunan Unggulan											
	- Kopi	ton	20,78	19,01	19,48	44,51	183,72	-8,52	2,47	128,49	312,76	108,80
	- Tembakau	ton	-	104,2	76,9	157,12	209,76	-	-26,20	104,32	33,50	37,21
13	Jumlah Populasi Sapi	ekor	66.553	66.994	68.329	68.464	55.183	0,66	1,99	0,20	-19,40	-4,14
14	Jumlah Populasi Kambing / Domba	ekor	146.923	149.337	151.327	152.899	153.569	1,64	1,33	1,04	0,44	1,11
15	Jumlah Populasi Ayam	ekor	9.878.178	10.005.850	10.215.220	10.351.341	12.520.658	1,29	2,09	1,33	20,96	6,42

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Jumlah Populasi Kelinci	ekor	13.424	13.772	13.791	13.810	6.556	2,59	0,14	0,14	-52,53	-12,42
17	Persentase Prasarana Pertanian sesuai Kebutuhan dan dalam Kondisi Baik	%	-	-	30,34	30,47	30,48	-	-	0,43	0,03	0,23
18	Angka Kesakitan Ternak Besar	%	5,4	8,1	8,2	7,8	7,9	50,00	1,23	-4,88	1,28	11,91
19	Angka Kesakitan Ternak Kecil	%	10,7	16,5	16,3	16,2	16,2	54,21	-1,21	-0,61	0,00	13,09
20	Angka Kesakitan Unggas	%	10,45	15,1	15,0	14,9	14,8	44,50	-0,66	-0,67	-0,67	10,62
21	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Cakupan Kelompok Tani yang Aktif	%	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indikator program Renstra 2025-2029											
1	% Lumbung pangan yang difasilitasi	%	56,52	60	62,96	-	-	6,16	4,93	-	-	5,55
2	Konsumsi Energi per Kapita per hari	Kkal/kapita/hari	1802	1921,5	1871,2	1873	2201,49	6,63	-2,62	0,10	17,53	5,41
3	Konsumsi Protein per kapita per hari	gram/kapita/hari	50,6	54,1	54,4	52,5	69,93	6,92	0,55	-3,49	33,20	9,29
4	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	28,81	14,69	14,69	11,30	2,82	49,01	0,00	23,08	75,04	36,78
5	Jumlah sertifikat ijin edar PSAT yang diterbitkan	sertifikat	-	-	-	-	138	-	-	-	-	-
6	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg	1.841.880	1.871.031	1.897.814	1.925.865	1.940.692	1,58	1,43	1,48	0,77	1,32
7	Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan daratan	%	-	-	-	-	35,29	-	-	-	-	-
8	Jumlah produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Padi, Jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)											
	- padi	Ton	333.306	341.820	342.002	343.995	343.996	2,55	0,05	0,58	0,00	0,80
	- jagung	Ton	21.822	27.494	23.102	24.917	27.264	25,99	-15,97	7,86	9,42	6,82
	- kacang tanah	Ton	343	590	339	683	3.207	72,01	-42,54	101,47	369,55	125,12
	- ubi kayu	Ton	86.079	77.238	73.453	77.376	74.553	-10,27	-4,90	5,34	-3,65	-3,37
	- ubi jalar	Ton	28.610	28.908	24.116	14.569	38.842	1,04	-16,58	-39,59	166,61	27,87
9	Jumlah produksi 10 komoditas hortikultura (cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, tanaman hias dan tanaman biofarmaka)											
	- cabai besar	Kuintal	26.928	34.053	23.045	20.373	28.440	26,46	-32,33	-11,59	39,60	5,53
	- cabai rawit	Kuintal	5.805	7.803	6.332	5.884	8.240	34,42	-18,85	-7,08	40,04	12,13
	- bawang merah	Kuintal	36.894	56.804	48.077	42.897	50.564	53,97	-15,36	-10,77	17,87	11,43
	- bawang putih	Kuintal	26.314	20.977	41.795	56.883	24.468	-20,28	99,24	36,10	-56,99	14,52
	- alpukat	Kuintal	16.709	80.739	92.385	103.611	96.314	383,21	14,42	12,15	-7,04	100,68
	- duku	Kuintal	14.864	9.430	15.392	57.490	3.992	-36,56	63,22	273,51	-93,06	51,78
	- durian	Kuintal	58.449	88.865	134.350	106.279	117.156	52,04	51,18	-20,89	10,23	23,14
	- jambu biji	Kuintal	12.128	17.656	24.828	62.148	25.157	45,58	40,62	150,31	-59,52	44,25
	- pisang	Kuintal	144.036	108.039	133.457	149.509	170.273	-24,99	23,53	12,03	13,89	6,11
	- tanaman hias (krisan)	Kuintal	308.880	1.046.040	678.740	1.294.272	1.247.400	238,66	-35,11	90,69	-3,62	72,65
	- tanaman biofarmaka (jahe)	Kuintal	4.243	5.863	4.364	4.363	5.739	38,18	-25,57	-0,02	31,54	11,03
10	Angka produksi komoditas perkebunan komoditas (tembakau, kopi, teh, cengkeh, kelapa, kakao) dalam tahun n											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- tembakau	Ton	-	104,2	76,89	157,12	209,76	-	-26,21	104,34	33,50	37,21
	- kopi	Ton	20,78	19,01	19,48	44,51	183,72	-8,52	2,47	128,49	312,76	108,80
	- cengkeh	Ton	87,29	48,86	58,7	68,77	38,37	-44,03	20,14	17,16	-44,21	-12,73
	- kelapa	Ton	639,68	565,69	481,88	451,09	460,97	-11,57	-14,82	-6,39	2,19	-7,65
	- kakao	Ton	30,65	25,15	22,19	25,17	25,32	-17,94	-11,77	13,43	0,60	-3,92
11	Jumlah populasi ternak (ternak besar, ternak kecil)											
	- Ternak besar	Ekor	66.794	67.252	68.620	68.720	55.427	0,69	2,03	0,15	-19,93	-4,27
	- Ternak kecil	Ekor	146.923	149.337	151.327	152.899	153.569	1,64	1,33	1,04	0,44	1,11
12	Prosentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik	%	-	-	-	-	28,56	-	-	-	-	-
13	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit menular	%	48,72	-46,55	51,6	-59,57	236,84	- 195,55	- 210,85	- 215,45	-497,58	- 279,86
14	Persentase bencana tanaman pangan dan hortikultura pertanian yang tertangani	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
15	Persentase bencana perkebunan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
16	Persentase peningkatan kelas Kelompok Tani	%	-	-	-	16,5	16,5	-	-	-	-	-

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Indikator Dispertan PP
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indikator Tujuan															
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-	-	-	6	6,15	6,2	3,58	5,87	5,53	5,82	-	-	-	93,87
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	-	-	-	72	73	75	-	-	-	84,47	-	-	-	112,63
3	Kontribusi Pertanian dalam PDRB	%	13,51	13,52	13,53	-	-	-	13,05	12,66	12,1	-	96,60	93,64	89,43	-
4	Pola Pangan Harapan	indeks	82	83,1	89,3	-	-	-	85,7	89,2	88,7	-	104,51	107,34	99,33	-
	Indikator Sasaran															
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	-	-	-	90	90,5	91	-	-	88,7	97,41	-	-	-	107,04
2	Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi)	ton/Ha	-	-	-	6,22	6,23	6,24	-	-	6,22	6,22	-	-	-	99,68
3	Produktivitas Perikanan	kg/m2	-	-	-	6,8	7	8	-	-		6,8	-	-	-	85,00
4	Nilai SAKIP OPD	nilai	74,48	75,48	76,48	76,73	76,98	77,23	74,34	70,7	71,7	72,65	99,81	93,67	93,75	94,07
5	Produksi Tanaman Pangan	Ton	475.809	476.791	477.849	-	-	-	474.466	514.868	482.534	-	99,72	107,99	100,98	-
6	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan (Padi)	Kw/Ha	61,00	62,00	63,00	-	-	-	61,00	62,20	62,20	-	100,00	100,32	98,73	-
7	Produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	11,00	12,00	13,00	-	-	-	13,36	18,70	15,90	-	121,45	155,83	122,31	-
8	Produktivitas Pertanian Perkebunan	Ton/Ha	0,64	0,67	0,70	-	-	-	0,73	0,72	0,80	-	114,06	107,46	114,29	-
9	Produksi Daging	Kg	5.646.121	5.928.427	6.224.848	-	-	-	8.142.810	8.738.693	8.917.526	-	144,22	147,40	143,26	-
10	Produksi Telur	Kg	16.288.657	17.103.090	17.958.244	-	-	-	21.669.692	20.613.510	21.333.380	-	133,04	120,53	118,79	-
11	Produksi susu	Liter	222.362	223.473	224.590	-	-	-	212.198	199.304	203.700	-	95,43	89,18	90,70	-
12	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	491.854	492.311	493.858	-	-	-	504.971	548.427	509.194	-	102,67	111,40	103,11	-
13	Produksi Perikanan	Kg	2.386.086	2.419.294	2.452.973	-	-	-	2.388.247	2.419.713	2.453.016	-	100,09	100,02	100,00	-
	Indikator Program															
1	Angka Konsumsi Energi (AKE)	kalori/kapita/tahun	-	-	-	1.940,00	1.945,00	1.950,00	-	-	-	2201,43	-	-	-	112,89
2	Angka Konsumsi Protein (AKP)	gram/kapita/tahun	-	-	-	55,50	56,00	56,50	-	-	-	69,93	-	-	-	123,77
3	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	-	-	-	88,00	88,50	90,00	-	-	-	89,67	-	-	-	99,63
4	Persentase Desa Rentan Pangan	%	-	-	-	14,12	13,56	12,99	14,69	14,69	11,30	2,82	-	-	-	21,71

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Persentase Pelaku Usaha PSAT-PDUK yang Memiliki Sertifikat	%	-	-	-	37,74	45,28	52,83	-	-	-	42,1	-	-	-	79,69
6	Produksi Perikanan Budidaya	kg	-	-	-	1.935.425	1.945.102	1.954.828	-	-	-	1.940.692	-	-	-	99,28
7	Persentase Perairan Umum Daratan yang Diawasi	%	-	-	-	25,00	30,00	35,00	-	-	-	35,29	-	-	-	100,83
8	Persentase Produk Perikanan yang Dipromosikan	%	-	-	-	60,00	65,00	75,00	-	-	-	64,29	-	-	-	85,72
9	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	-	-	-	85,00	86,00	87,00	-	-	-	80	-	-	-	91,95
10	Produksi Tanaman Pangan Utama															
	- Padi	ton	-	-	-	342.090	342.110	342.130	-	-	-	342.090	-	-	-	99,99
	- Jagung	ton	-	-	-	20.885	20.920	21.080	-	-	-	20.885	-	-	-	99,07
11	Produksi Hortikultura Unggulan															
	- Jahe	ton	-	-	-	4.365	4.390	4.409	-	-	-	4.365	-	-	-	99,00
	- Buah Durian	ton	-	-	-	13.470	13.500	13.560	-	-	-	13.470	-	-	-	99,34
12	Produksi Perkebunan Unggulan															
	- Kopi	ton	-	-	-	27,00	27,50	28,10	-	-	-	27	-	-	-	96,09
	- Tembakau	ton	-	-	-	61,00	62,20	23,50	-	-	-	61	-	-	-	259,57
13	Jumlah Populasi Sapi	ekor	-	-	-	68.566	68.909	69.254	66.994	68.329	68.464	55.183	-	-	-	79,68
14	Jumlah Populasi Kambing / Domba	ekor	-	-	-	153.395	154.929	156.478	149.337	151.327	152.899	153.569	-	-	-	98,14
15	Jumlah Populasi Ayam	ekor	-	-	-	11.575.208	11.690.960	12.041.689	10.005.850	10.215.220	10.351.341	12.520.658	-	-	-	103,98
16	Jumlah Populasi Kelinci	ekor	-	-	-	13.438	13.505	13.573	13.772	13.791	13.810	6.556	-	-	-	48,30
17	Persentase Prasarana Pertanian sesuai Kebutuhan dan dalam Kondisi Baik	%	-	-	-	31,01	31,34	31,68	-	-	-	30,47	-	-	-	96,18
18	Angka Kesakitan Ternak Besar	%	-	-	-	7,90	7,20	7,60	-	-	-	7,9	-	-	-	103,95
19	Angka Kesakitan Ternak Kecil	%	-	-	-	16,20	16,10	16,00	-	-	-	16,2	-	-	-	101,25
20	Angka Kesakitan Unggas	%	-	-	-	14,80	14,70	14,50	-	-	-	14,8	-	-	-	102,07
21	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100	-	-	-	100,00
22	Cakupan Kelompok Tani yang Aktif	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100	-	-	-	100,00

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Keuangan Dispertan PP
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	500.000	1.000.000	-	-	-	100.000	499.803	1.000.000	-	-	99,96	100,00	-	-
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	323.035	165.000	55.000	118.350	75.000	75.000	307.231	164.850	55.000	117.753	95,11	99,91	100,00	99,50
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	8.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	8.000	19.944	15.000	15.000	100,00	99,72	100,00	100,00
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	15.000	30.000	25.000	-	-	-	15.000	30.000	25.000	-	100,00	100,00	100,00	-
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.640.950	1.070.500	602.500	650.500	660.000	660.000	1.551.257	1.070.170	602.383	647.311	94,53	99,97	99,98	99,51
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	30.000	25.000	25.000	-	-	-	29.998	-	-	-	99,99
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	25.000	65.000	30.000	32.500	30.000	30.000	25.000	65.000	29.966	31.902	100,00	100,00	99,89	98,16
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	23.929.020	24.655.912	28.205.727	19.877.411	19.868.638	19.868.638	21.826.068	21.118.218	25.290.210	19.222.323	91,21	85,65	89,66	96,70
10	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	20.804.334	22.875.500	22.601.487	22.943.896	16.788.210	16.788.210	19.558.120	20.592.499	21.842.323	21.474.523	94,01	90,02	96,64	93,60
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.684.932	6.105.829	10.713.800	6.611.678	4.372.735	7.922.735	7.585.232	5.667.394	10.624.083	6.071.637	98,70	92,82	99,16	91,83
12	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.000	170.000	195.575	220.575	75.000	75.000	49.314	168.520	191.880	215.496	98,63	99,13	98,11	97,70
13	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.000	45.000	40.000	25.000	30.000	30.000	74.729	44.760	38.500	24.000	99,64	99,47	96,25	96,00
14	Program Penyuluhan Pertanian	498.000	436.450	630.250	514.930	492.172	492.172	475.961	423.426	628.048	514.586	95,57	97,02	99,65	99,93

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dispertan PP Kabupaten Karanganyar memiliki beragam program dan layanan yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran dalam pertanian, perikanan dan ketahanan pangan. Berikut adalah tiga kelompok sasaran utama yang menjadi fokus layanan:

a. Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani

Pertanian disini dalam arti luas, sehingga meliputi petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan juga termasuk peternak.

b. Kelompok pembudidaya ikan

Kelompok pembudidaya ikan meliputi usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan air tawar

c. Pelaku usaha agribisnis

Dalam hal ini meliputi pengusaha dibidang pertanian meliputi distributor pupuk dan benih. Selain itu UMKM pengolah hasil pertanian dan pelaku usaha pangan lokal

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Mitra Dispertan PP dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - a. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi non pertanian.
 - b. Terbatas dan tidak meratanya ketersediaan benih yang berkualitas.
 - c. Belum optimalnya penanganan organisme pengganggu tumbuhan.
 - d. Belum optimalnya produktivitas pertanian.
 - e. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.
2. Bidang Perkebunan;
 - a. Tidak adanya kepastian harga hasil perkebunan
 - b. Kurangnya akses pasar dan informasi harga
 - c. Terbatasnya pengolahan pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan
3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
 - a. Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi.
 - b. Belum memadainya jalan usaha tani.
 - c. Belum meratanya pemberian Alsintan pada kelompok tani.
 - d. Belum optimalnya penyerapan pupuk bersubsidi.
 - e. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian.
 - f. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
 - a. Belum optimalnya penanganan penyakit ternak.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana peternakan.
 - c. Belum optimalnya produksi peternakan.
 - d. Keterbatasan tenaga medis hewan.
 - e. Belum tersedianya laboratorium kesehatan hewan.
5. Bidang Ketahanan Pangan,
 - a. Belum optimalnya penanganan daerah rentan pangan
 - b. Belum meratanya distribusi pangan

- c. Belum optimalnya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
- d. Belum optimalnya sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang.
- e. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.
- 6. Bidang Perikanan,
 - a. Belum optimalnya hasil perikanan.
 - b. Hasil olahan perikanan belum sesuai standar yang ada.
 - c. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.

Berikut pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Tabel 2.7.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya kontribusi pertanian dan perikanan dalam perekonomian dan ketahanan pangan	Rendahnya produktivitas dan keberlanjutan produksi tanaman pangan dan hortikultura	a. Bertambahnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan pertanian b. Terbatas dan tidak meratanya ketersediaan benih unggul c. Belum optimalnya penanganan organisme perusak tanaman d. Produktivitas lahan yang menurun
2		Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan	a. Tidak adanya kepastian harga hasil perkebunan b. Kurangnya akses pasar dan informasi harga c. Terbatasnya pengolahan pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan
3		Belum memadainya dukungan sarana prasarana untuk peningkatan produksi pertanian	a. Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi b. Belum memadainya jalan usaha tani c. Belum meratanya pemberian Alsintan pada kelompok tani
4		Rendahnya produktivitas dan kesehatan populasi ternak	a. Belum optimalnya penanganan penyakit ternak b. Terbatasnya sarana dan prasarana peternakan c. Keterbatasan tenaga medis hewan dan laboratorium uji kesehatan hewan.
5		Belum terjaminnya stabilitas dan akses pangan yang berkualitas bagi masyarakat	a. Belum optimalnya penanganan daerah rentan pangan b. Belum meratanya distribusi pangan c. Belum optimalnya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi pangan yang sehat dan beragam
6		Rendahnya produktivitas dan kualitas hasil perikanan	a. Belum optimalnya hasil perikanan b. Hasil olahan perikanan belum sesuai standar yang ada

2.2.2. Isu Strategis

Penyusunan isu strategis harus melihat kesenjangan antara kondisi nyata dan capaian ideal. Hal ini mencakup permasalahan mendasar yang jika tidak ditangani akan menghambat potensi daerah secara signifikan. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 tahun 2025, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Perumusan isu strategis Dispertan PP memperhatikan permasalahan yang ada di Dispertan PP, Isu KLHS, Isu Nasional dan Isu Regional, berikut tabel kerja perumusan isu strategis Dispertan PP.

Tabel 2.8.

Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dispertan PP

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Hasil pertanian yang beragam dan menjadi salah satu komoditas utama.	Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perikanan dalam meningkatkan ketahanan pangan daeah	Penurunan Ketahanan Pangan	• Produksi dan konsumsi berkelanjutan • Pangan dan gizi	Ketahanan Sosial, Budaya dan ekologi : Isu Agama, Isu Budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, Pangan, energi, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum Optimalnya kontribusi pertanian dan perikanan dalam perekonomian dan ketahanan pangan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta peninjauan terhadap visi-misi kepala daerah, sasaran RPJMD, isu strategis Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dapat dirumuskan sebagai berikut :

Belum Optimalnya kontribusi pertanian dan perikanan dalam perekonomian dan ketahanan pangan.

Sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Karanganyar Pertanian dan Perikanan belum optimal, bahkan cenderung mengalami penurunan. Selain tu dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah peran pertanian dan perikanan juga belum optimal, hal ini karena hasil pertanian dan perikanan lebih banyak dikirim keluar daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode masa jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.** Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera.

Tujuan jangka menengah Dispertan PP Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut **“Meningkatnya kontribusi pertanian dalam perekonomian dan ketahanan pangan”**. Sedangkan sasaran jangka menengah Dispertan PP Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keanekaragaman Pangan Masyarakat
2. Meningkatkan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan
3. Meningkatkan Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah
4. Meningkatkan Produksi Peternakan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dispertan PP Kabupaten Karanganyar sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kontribusi Pertanian dalam Perekonomian dan Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan <i>z-score</i> dan <i>distance to scale</i> (0-100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP	Angka	89,67	89,7	89,72	89,75	89,78	89,8	89,85	89,85

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun (Kg/Kapita/Tahun) dihitung melalui data Susenas yang dilakukan oleh BPS dan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah (Data T-1)	Kg/ Kapita / Tahun	23,61	24,03	24,25	24,5	24,75	25,00	25,25	25,25
	Meningkatnya keanekaragaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan (9 kelompok pangan: padi-	skor	97,41	97,42	97,43	97,44	97,45	97,46	97,47	97,47

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan buah-buahan lainnya)									
	Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (tangkapan nelayan di perairan umum darat meliputi sungai, rawa, dan genangan air lainnya) ditambah Produksi Perikanan Budidaya (produksi ikan konsumsi yang	Ton	2467,98	2488,7	2509,62	2530,75	2552,07	2573,6	2595,33	2595,33

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			diusahakan melalui pembudidayaan yang berasal dari kolam, keramba, mina padi dan tambak)									
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Per Hektar per Tahun dibagi Luas panen (Padi, Jagung dan Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar))	Ton/Ha/Tahun	7,69	7,7	7,71	7,72	7,73	7,74	7,75	7,75
		- Padi	Jumlah Produksi padi per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	6,223	6,224	6,225	6,226	6,227	6,228	6,229	6,229

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		- Jagung	Jumlah Produksi jagung per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	7,1	7,11	7,12	7,15	7,17	7,18	7,19	7,19
		- Kacang tanah	Jumlah Produksi kacang tanah per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	2,1	2,1
		- Ubi Kayu	Jumlah Produksi ubi kayu per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	37,84	37,88	37,9	37,92	37,97	37,99	38,01	38,01
		- Ubi Jalar	Jumlah Produksi ubi jalar per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	44,82	44,83	44,85	44,86	44,87	44,89	44,9	44,9
	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging	Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Pedaging,	Kg	9.310.243	9.333.519	9.356.794	9.380.070	9.403.345	9.426.621	9.449.897	9.449.897

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Ayam Ras Petelur, Itik)									
		Produksi Telur	Jumlah Produksi Telur (Ayam Petelur, Ayam Buras, Bebek, Puyuh)	Kg	23.704.750	23.764.012	23.823.274	23.882.536	23.941.798	24.001.059	24.060.321	24.060.321
		Produksi Susu	Jumlah Produksi Susu (Sapi dan Kambing)	liter	193.970	194.455	194.940	195.425	195.910	196.395	196.880	196.880
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Hasil survei	Indeks	80,325	80,80	81,30	81,80	82,30	82,80	83,30	83,30

Tabel 3.2.
Cascading Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya Kontribusi Pertanian dalam Perekonomian dan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Persentase lumbung pangan yang difasilitasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kemandirian dan cadangan pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
											Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
					Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga	[1] Konsumsi energi per kapita per hari [2] Konsumsi protein perkapita per hari	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terjaganya persediaan dan stabilitas harga pangan	Jumlah Laporan persediaan dan stabilitas harga pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
											Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								Terkelolanya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang tersedia	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
											Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
								Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Menurunnya wilayah dan jumlah penduduk rawan pangan secara berkelanjutan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
								Meningkatnya ketersediaan informasi kewaspadaan pangan dan gizi melalui penyusunan laporan SKPG	Jumlah laporan SKPG yang disusun	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Terjaminnya keamanan pangan dari hulu ke hilir demi perlindungan kesehatan masyarakat	Jumlah sertifikat ijin edar PSAT yang diterbitkan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
											Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Meningkatnya Produksi Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
											Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
								Terlaksananya fasilitas dan pengelolaan sarana pembudidayaan ikan	Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang difasilitasi/dikelola	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
													Kabupaten/Kota
					Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan darat	Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
					Meningkatnya pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Meningkatnya Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Meningkatnya Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan 1. Padi 2. Jagung 3. Kacang Tanah 4. Ubi Kayu 5. Ubi Jalar	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	[1] Terawasnya penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura [2] Terawasnya penggunaan sarana pertanian perkebunan [3] Terlaksananya pendampingan kepada petani dalam penggunaan sarana pendukung pertanian	[1] Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura [2] Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian perkebunan [3] Jumlah petani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terawasnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Meningkatnya Produksi Peternakan	[1] Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik) [2] Produksi Telur (Ayam Petelur, Ayam Buras, Bebek, Puyuh) [3] Produksi Susu (Sapi dan Kambing)	Meningkatnya Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji. pisang, tanaman hias, tanaman biofarmaka)	Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura 1. Cabai besar 2. Cabai rawit 3. Bawang Merah 4. Bawang Putih 5. Alpukat 6. Duku 7. Durian 8. Jambu Biji 9. Pisang 10. Tanaman Hias (Krisan) 11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Meningkatnya produksi unggulan komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Tebu)	Angka produksi komoditas perkebunan komoditas 1. Tembakau 2. Kopi 3. Teh 4. Cengkeh 5. Kelapa 6. Kakao					Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar Sapi, Ternak Kecil Kambing dan Domba serta unggas)	Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas) 1. Ternak Besar (Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau) 2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba) 3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik)					Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
											Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
											Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
											Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
												tanaman pangan	
								[1] Meningkatnya pemanfaatan SDG hewan oleh kelompok ternak kewenangan Kabupaten/Kota [2] Meningkatnya kapasitas kelompok tani dalam tanaman pangan dan hortikultura melalui pengelolaan SDG tumbuhan kewenangan Kabupaten/Kota	[1] Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan manfaat [2] Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas tentang tanaman pangan dan hortikultura	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
											Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
								Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak, dan pakan yang beredar	Jumlah laporan hasil pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, TPT, dan pakan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								di wilayah kabupaten/kota		Kabupaten/Kota			
								Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
					Meningkatnya cakupan dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung usaha tani	Presentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Berkembangnya Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
											Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											CP2B di Kabupaten/Kota	LCP2B yang dikelola	Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota
											Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
								Terbangunnya Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
											terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
											Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Menurunnya kasus penyakit hewan dan zoonosis melalui sistem kesehatan hewan yang terpadu	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
											Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
					Meningkatnya penanganan bencana terhadap sektor pertanian melalui upaya mitigasi dan adaptasi	[1] Persentase Bencana Tanaman pangan dan Hortikultura Pertanian yang Tertangani [2] Persentase Bencana Perkebunan yang Tertangani	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	[1] Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura [2] Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	[1] Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura [2] Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kotaka	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
											Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan yang efektif	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Program Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
											Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
											Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
											Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dalam Pengelolaan Kebijakan Publik		Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya penyusunan laporan / dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
											Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
											Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
											Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
								Terlaksananya a penyusunan laporan/doku	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								men keuangan					
											Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
											Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
											Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Terlaksananya a penyusunan laporan/dokumen administrasi barang milik	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada	Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								daerah pada perangkat daerah	Perangkat Daerah				
											Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
											Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
								Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah melalui penyusunan laporan/dokumen sesuai ketentuan	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
											Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah
								Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Terlaksananya a penyediaan dan fasilitasi layanan administrasi umum perangkat daerah (sarana prasarana, logistik, rapat/kunjungan, kearsipan, dan dukungan SPBE) sesuai standar.	Jumlah Paket/Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan/T erlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
											Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
											Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
											Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
											Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
											Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
											Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
											Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
											Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
								Terlaksananya a pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
											Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
											Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
											Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
								Terlaksananya a pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan.	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
											Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi dan kebijakan Dispertan PP menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) dari program prioritas RPJMD Kabupaten Karanganyar yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dispertan PP. Rumusan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan rencana menyeluruh Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk meraih tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh ini juga berperan sebagai alat untuk mendorong transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan Keanekaragaman Pangan Masyarakat

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Meningkatkan cadangan pangan daerah dengan penguatan lumbung pangan daerah dan desa
- b. Diversifikasi pangan sesuai dengan potensi daerah

Sasaran 2. Meningkatkan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Melakukan adopsi teknologi perikanan dengan modernisasi alat tangkap dan budidaya perikanan
- b. Melakukan regenerasi pembudidaya ikan dengan pelatihan pada pembudidaya muda.

Sasaran 3. Meningkatkan Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Melakukan adopsi teknologi pertanian dengan modernisasi alsintan.
- b. Pengembangan varietas dan bibit unggul lokal
- c. Melakukan regenerasi SDM pertanian dengan pelatihan petani muda, revitalisasi kelembagaan tani serta sertifikasi penyuluh pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Meningkatkan efisiensi distribusi sarana produksi pertanian.
- e. Peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier dan optimalisasi embung.

Sasaran 4. Meningkatkan Produksi Peternakan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Penerapan teknologi peternakan modern, termasuk pengembangan bibit unggul, pakan berkualitas, dan tata kelola kandang yang sesuai dengan kaidah kesehatan hewan.
- b. Penguatan kapasitas peternak dan kelembagaan kelompok ternak melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha serta lembaga keuangan.
- c. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dengan memperkuat sistem kesehatan hewan, vaksinasi rutin, dan peningkatan kesadaran biosekuriti di tingkat peternak.
- d. Pengembangan sistem rantai pasok dan pemasaran hasil peternakan agar lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui digitalisasi pasar dan penguatan akses distribusi.

- e. Pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal untuk penyediaan pakan dan pengembangan usaha peternakan berbasis wilayah, sesuai potensi sumber daya alam dan kebutuhan pasar daerah.

Sasaran 5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja melalui penyusunan program berdasarkan data dan hasil evaluasi sebelumnya, serta memastikan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kegiatan (IKK) secara terukur dan konsisten.
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Program dan Layanannya melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik sesuai dengan SP dan SOP.

Tabel 3.3.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Ketahanan Pangan didukung dengan Produksi Pertanian, Perikanan	Penguatan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Pangan	Penguatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Pangan	Perwujudan Ketahanan Pangan yang Mandiri dengan mengutamakan potensi lokal pertanian dan perikanan	Perwujudan Harmoni dalam Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
1. Identifikasi potensi Pertanian, Perikanan dan di Kabupaten Karanganyar. 2. Identifikasi daerah rentan pangan 3. Identifikasi permasalahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan. 4. Penyempurnaan SP dan SOP pelayanan publik	1. Pelatihan dan pendampingan kelompok tani, perkebunan, peternakan, perikanan dan pelaku usaha pangan. 2. Regenerasi petani untuk menjaga keberlanjutan pertanian. 3. Penguatan Peran dan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	1. Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi, jalan usaha tani 2. Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya 3. Modernisasi Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan 4. Penguatan Sarana Pascapanen, Penyimpanan, dan Pengolahan	1. Perwujudan sarpras pertanian dan perikanan yang berkualitas 2. Peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan 3. Penguatan kelembagaan petani, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal	1. Perwujudan integrasi sistem pangan daerah dari hulu ke hilir 2. Perwujudan prinsip ekologi dan berkelanjutan di bidang pertanian dan perikanan 3. produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan untuk mendukung kemandirian pangan daerah

3.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian dengan pengembangan varietas unggul lokal dan adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas penyuluhan dan pendampingan petani berbasis digital, optimalisasi lahan sawah, ladang, dan tegalan secara intensif dan berkelanjutan
2. Regenerasi Petani dan Pengembangan SDM Pertanian dengan program pertanian milenial dan pemuda tani, revitalisasi kelembagaan petani: kelompok tani (poktan), gapoktan, dan BUMDes pertanian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyuluh pertanian.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter, pembangunan jalan usaha tani dan akses ke lahan produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berbasis kelompok, optimalisasi pemanfaatan embung dan dam parit untuk pengairan.
4. Peningkatan produksi dan daya saing subsektor peternakan melalui penerapan teknologi budidaya modern, penguatan kapasitas peternak, serta pengendalian penyakit hewan secara terpadu guna menjamin ketersediaan produk peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan.
5. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) melalui perda dan tata ruang, edukasi praktik pertanian ramah lingkungan (organik, pengendalian hayati, dll.), pengendalian penggunaan pestisida dan bahan kimia secara bijak, pengembangan pertanian berkelanjutan di dataran tinggi (konservasi tanah dan air)
6. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan desa, diversifikasi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, hortikultura), penguatan sistem distribusi dan logistik pangan antar kecamatan/desa, monitoring dan penanggulangan daerah rentan pangan
7. Penguatan produksi perikanan budidaya air tawar dengan pengembangan teknologi budidaya intensif dan ramah lingkungan (bioflok, kolam terpal, dan sistem resirkulasi), peningkatan kapasitas pembudidaya ikan melalui pelatihan teknis, penyediaan induk unggul dan benih berkualitas (ikan lele, nila, patin, gurame, dll).

Tabel 3.4.
Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani millennial, pembangunan perikanan difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya;	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian dengan pengembangan varietas unggul lokal dan adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas penyuluhan dan pendampingan petani berbasis digital, optimalisasi lahan sawah, ladang, dan tegalan secara intensif dan berkelanjutan 2. Regenerasi Petani dan Pengembangan SDM Pertanian dengan program pertanian milenial dan pemuda tani, revitalisasi kelembagaan petani: kelompok tani	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		(poktan), gapoktan, dan BUMDes pertanian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyuluh pertanian. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter, pembangunan jalan usaha tani dan akses ke lahan produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berbasis kelompok, optimalisasi pemanfaatan embung dan dam parit untuk pengairan 4. Peningkatan produksi dan daya saing subsektor peternakan melalui penerapan teknologi budidaya modern, penguatan kapasitas peternak, serta pengendalian penyakit hewan secara terpadu guna menjamin ketersediaan produk peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan. 5. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) melalui perda dan tata ruang, sdukasi praktik pertanian ramah lingkungan (organik, pengendalian hayati, dll.), pengendalian penggunaan pestisida dan bahan kimia secara bijak, pengembangan pertanian berkelanjutan di dataran tinggi (konservasi tanah dan air) 6. Penguatan produksi perikanan budidaya air tawar dengan pengembangan teknologi budidaya intensif dan ramah lingkungan (bioflok, kolam terpal, dan sistem resirkulasi), peningkatan kapasitas pembudidaya ikan melalui pelatihan teknis, penyediaan induk unggul dan benih berkualitas (ikan lele, nila, patin, gurame, dll).	
2	Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;	Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan desa, diversifikasi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, hortikultura), penguatan sistem distribusi dan logistik pangan antar kecamatan/desa, monitoring dan penanggulangan daerah rentan pangan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dispertan PP Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan

- a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rentan pangan.

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengawasan dan keamanan pangan, pengujian keamanan mutu pangan.

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan kelompok pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana budidaya. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, sehingga dapat memperkuat ketahanan usaha perikanan skala kecil maupun menengah.

a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- 2) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan pengawasan, penyuluhan secara terkoordinasi. Fokus utama adalah memperluas cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan daratan agar pemanfaatan sumber daya dilakukan secara tertib, adil, dan berkelanjutan, serta mampu menjaga kelestarian ekosistem perairan.

a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota

7. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan melalui pengolahan hasil yang higienis dan memenuhi standar mutu, serta memperkuat akses pasar. Dengan demikian, diharapkan peningkatan cakupan bina pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan

a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko.

8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana produksi pertanian dan peternakan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyediaan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, serta penyediaan sarana produksi peternakan seperti bibit ternak unggul, pakan, obat hewan, dan vaksin. Selain itu, program ini juga mendukung peningkatan produksi daging, telur, dan susu, serta peningkatan populasi ternak ruminansia dan non-ruminansia guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung kemandirian pangan hewani.

- a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - 3) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
 - 4) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
 - 5) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
 - 6) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - 7) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- d. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung pertanian dan peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran usaha tani dan ternak. Kegiatan utama meliputi pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang hasil pertanian. Di bidang peternakan, program ini mencakup fasilitasi penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha produk hewan, serta peningkatan kualitas dan jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) agar sesuai standar kesehatan masyarakat veteriner dan mendukung jaminan mutu produk peternakan

- a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - 2) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

- 3) Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
- b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta jaminan keamanan produk asal hewan bagi kesehatan masyarakat.

- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - 2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- c. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

11. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan terhadap gangguan usaha tani akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, atau perubahan iklim.

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 2) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

12. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani melalui pendampingan dan diseminasi teknologi pertanian yang tepat guna.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - 3) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

- 4) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui dukungan administrasi, peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem informasi, dan perbaikan infrastruktur untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas.

Program ini difokuskan untuk memberikan dukungan atas

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - 2) Pengolahan Data Retribusi Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
TJ 3) Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Meningkatnya Kontribusi Pertanian dalam Perekonomian dan Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)				
			Angka Konsumsi Ikan (AKI)				
		Meningkatnya keanekaragaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)				
		Meningkatnya Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun				
			- Padi				
			- Jagung				
			- Kacang tanah				
			- Ubi Kayu				
			- Ubi Jalar				
		Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik)				
			Produksi Telur (Ayam Petelur, Ayam Buras, Bebek, Puyuh)				
			Produksi Susu (Sapi dan Kambing)				
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM				
URUSAN PANGAN							
			Meningkatnya kemandirian pangan daerah		Persentase lumbung pangan yang difasilitasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kemandirian dan cadangan pangan	
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga		Konsumsi energi per kapita per hari	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Konsumsi protein perkapita per hari		
				Terjaganya persediaan dan stabilitas harga pangan	Jumlah Laporan persediaan dan stabilitas harga pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang tersedia	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
			Menurunnya wilayah dan jumlah penduduk rawan pangan secara berkelanjutan		Persentase daerah rentan rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Meningkatnya ketersediaan informasi kewaspadaan pangan dan gizi melalui penyusunan laporan SKPG	Jumlah laporan SKPG yang disusun	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya keamanan pangan dari hulu ke hilir demi perlindungan kesehatan masyarakat		Jumlah sertifikat ijin edar PSAT yang diterbitkan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Jumlah produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan darat		Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
				Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
URUSAN PERTANIAN							
			Meningkatnya Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)		Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					1. Padi		
					2. Jagung		
					3. Kacang Tanah		
					4. Ubi Kayu		
					5. Ubi Jalar		
			Meningkatnya Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, tanaman hias, tanaman biofarmaka)		Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, Tanaman hias dan tanaman biofarmaka)		
					1. Cabai besar		
					2. Cabai rawit		
					3. Bawang Merah		
					4. Bawang Putih		
					5. Alpukat		
					6. Duku		
					7. Durian		
					8. Jambu Biji		
					9. Pisang		
					10. Tanaman Hias (Krisan)		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)		
			Meningkatnya produksi unggulan komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Tebu) dalam tahun n		Angka produksi komoditas perkebunan komoditas (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao) dalam tahun n		
					1. Tembakau		
					2. Kopi		
					3. Teh		
					4. Cengkeh		
					5. Kelapa		
					6. Kakao		
			Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar Sapi, Ternak Kecil Kambing dan Domba serta unggas)		Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas)		
					1. Ternak Besar (Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)		
					2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)		
					3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik)		
				Terawasnya penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Terawasnya penggunaan sarana pertanian perkebunan	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian perkebunan		
				Terlaksananya pendampingan kepada petani dalam penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah petani yang mendapat pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		
				Terawasnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terawasnya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
				Terawasnya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Terawasnya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Terawasnya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Meningkatnya pemanfaatan SDG hewan oleh kelompok ternak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan manfaat	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kapasitas kelompok tani dalam tanaman pangan dan hortikultura melalui pengelolaan SDG tumbuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas tentang tanaman pangan dan hortikultura		
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya cakupan dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung usaha tani		Presentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Berkembangnya Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Terbangunnya Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Menurunnya kasus penyakit hewan dan zoonosis melalui sistem kesehatan hewan yang terpadu		Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Meningkatnya penanganan bencana terhadap sektor pertanian melalui upaya mitigasi dan adaptasi		Persentase Bencana Tanaman pangan dan hortikultura Pertanian yang Tertangani	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Bencana perkebunan yang Tertangani		
				Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan		
				Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani		Persentase peningkatan kelas kelompok tani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			melalui penyuluhan yang efektif				
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
				Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
			Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya penyusunan jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya penyusunan laporan/dokumen keuangan	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya penyusunan laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah melalui penyusunan laporan/dokumen sesuai ketentuan	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya penyediaan dan fasilitasi layanan administrasi umum perangkat daerah (sarana prasarana, logistik, rapat/kunjungan, kearsipan, dan dukungan SPBE) sesuai standar.	Jumlah Paket/Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan/Terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan.	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
URUSAN PANGAN							250,000,000		250,000,000		1,340,000,000		1,340,000,000		1,340,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Persentase lumbung pangan yang difasilitasi	%	100	100	100	30,000,000	100	30,000,000	100	1,050,000,000	100	1,050,000,000	100	1,050,000,000	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kemandirian dan cadangan pangan	Unit	27	27	27	30,000,000	27	30,000,000	28	1,050,000,000	29	1,050,000,000	30	1,050,000,000	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	27	27	27	-	27	-	28	1,020,000,000	29	1,020,000,000	30	1,020,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	NA	NA	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga	Konsumsi protein perkapita per hari	gram/kapita/hari	63.93		64.2	125,000,000	64.4	125,000,000	64.6	175,000,000	64.8	175,000,000	65	175,000,000	
		Konsumsi energi per kapita per hari	kcal/kapita/hari	2201.43		2201.8		2202		2202.2		2202.4		2202.5		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terjaganya persediaan dan stabilitas harga pangan	Jumlah Laporan persediaan dan stabilitas harga pangan	Laporan	12	12	12	45,000,000	12	45,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	52	52	52	20,000,000	52	20,000,000	52	25,000,000	52	25,000,000	52	25,000,000	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	4	25,000,000	4	25,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang tersedia	Ton		23.65	23.65	35,000,000	23.65	35,000,000	23.65	55,000,000	23.65	55,000,000	23.65	55,000,000	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	5.94	3.1	3	30,000,000	3	30,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Ton	NA	23.65	23.65	5,000,000	23.65	5,000,000	23.65	10,000,000	23.65	10,000,000	23.65	10,000,000	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Laporan	1	1	1	45,000,000	1	45,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	3	1	45,000,000	1	45,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya wilayah dan jumlah penduduk rawan pangan secara berkelanjutan	Persentase daerah rentan pangan	%	2.82	2.8	2.78	40,000,000	2.76	40,000,000	2.74	50,000,000	2.72	50,000,000	2.7	50,000,000	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	NA	NA	1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan informasi kewaspadaan pangan dan gizi melalui penyusunan laporan SKPG	Jumlah laporan SKPG yang disusun	Laporan	1	1	12	15,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terjaminnya keamanan pangan dari hulu ke hilir demi perlindungan kesehatan masyarakat	Jumlah sertifikat ijin edar PSAT yang diterbitkan	sertifikat	138	156	176	55,000,000	198	55,000,000	218	65,000,000	238	65,000,000	258	65,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	2	55,000,000	2	55,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							810,000,000		810,000,000		830,000,000		830,000,000		830,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Jumlah produksi perikanan budidaya	kg	1,940,692	1,945,102	1,948,990	720,000,000	1,952,890	720,000,000	1,956,795	720,000,000	1,960,710	720,000,000	1,964,630	720,000,000	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Kelompok	13	10	10	600,000,000	10	600,000,000	10	600,000,000	10	600,000,000	10	600,000,000	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	13	22	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	NA	NA	20	560,000,000	20	560,000,000	20	560,000,000	20	560,000,000	20	560,000,000	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya fasilitas dan pengelolaan sarana pembudidayaan ikan	Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang difasilitasi/dikelola	Unit	2	2	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan darat	Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan	%	35.29	35.29	35.29	40,000,000	37.5	40,000,000	40	50,000,000	45	50,000,000	50	50,000,000	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Laporan	6	5	5	40,000,000	6	40,000,000	7	50,000,000	8	50,000,000	9	50,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	25	25	25	40,000,000	30	40,000,000	35	50,000,000	40	50,000,000	45	50,000,000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	%	14	25	30	50,000,000	35	50,000,000	40	60,000,000	45	60,000,000	50	60,000,000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Laporan	5	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	5	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	
URUSAN PERTANIAN							44,031,755,295		43,031,744,295		45,821,744,295		48,821,744,295		48,821,744,295	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton				18,500,000,000		18,500,000,000		19,000,000,000		20,500,000,000		20,500,000,000	
		1. Padi	Ton	343996	344020	344032		344039		344042		344044		344049		
		2. Jagung	Ton	27264	27300	27320		27331		27343		27350		27352		
		3. Kacang Tanah	Ton	3207	3210	3215		3220		3222		3226		3228		
		4. Ubi Kayu	Ton	74553	74560	74570		74580		74590		74595		74560		
		5. Ubi Jalar	Ton	38842	38850	38860		38867		38870		38880		38890		
	Meningkatnya Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, tanaman hias, tanaman biofarmaka)	Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, Tanaman hias dan tanaman biofarmaka)	Kuintal													
		1. Cabai besar	Kuintal	28440	28445	28450		28455		28460		28470		28480		
		2. Cabai rawit	Kuintal	8240	8250	8255		8260		8266		8270		8280		
		3. Bawang Merah	Kuintal	50564	50570	50572		50575		50578		50580		50590		
		4. Bawang Putih	Kuintal	24468	24470	24475		24477		24480		24482		24490		
		5. Alpukat	Kuintal	96314	96415	96496		96517		96618		96719		96790		
		6. Duku	Kuintal	3992	4003	4104		4205		4266		4287		4300		
		7. Durian	Kuintal	117156	117177	117180		117200		117300		117361		117462		
		8. Jambu Biji	Kuintal	4118	4221	4230		4240		4250		4260		4270		
		9. Pisang	Kuintal	170273	170274	170280		170290		170296		170300		170310		
		10. Tanaman Hias (Krisan)	Tangkai	124740 0	124745 0	1247460		1247470		1247480		1247490		1247500		
		11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)	Kuintal	5739	5740	5745		5746		5748		5750		5755		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya produksi unggulan komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Tebu) dalam tahun n	Angka produksi komoditas perkebunan komoditas (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao) dalam tahun n	ton													
		1. Tembakau	ton	209.76	243,20	255,36		268,13		281,53		295,61		310,39		
		2. Kopi	ton	183.72	192,37	202,56		212,68		223,31		224,47		235,69		
		3. Teh	ton	4.6	4.7	4.8		4.9		5		5.1		5.2		
		4. Cengkeh	ton	38.37	40,29	42,30		45,05		47,30		49,67		52,15		
		5. Kelapa	ton	460.97	461,20	484,26		508,47		533,89		560,58		588,61		
		6. Kakao	ton	25.32	26,59	27,92		29,32		30,79		32,33		33,95		
	Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar Sapi, Ternak Kecil Kambing dan Domba serta unggas)	Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas)	Ekor													
		1. Ternak Besar (Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)	Ekor	55,427	55,567	55,707		55,847		55,987		56,128		56,270		
		2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	Ekor	153,569	153,953	154,338		154,724		155,110		155,498		155,887		
		3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik)	Ekor	12,576,777	12,608,219	12,639,740		12,671,339		12,703,017		12,734,774		12,766,611		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terawasinya penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Laporan	4	4	5	2,700,000,000	5	2,700,000,000	5	3,040,000,000	5	4,050,000,000	5	4,050,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Terawasinya penggunaan sarana pertanian perkebunan	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian perkebunan	Laporan	24000	26000	5		5		5		5		5		
	Terlaksananya pendampingan kepada petani dalam penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah petani yang mendapat pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Petani	68755	67255	67255		67255		67255		67255		67255		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	5	3	3	1,250,000,000	3	1,250,000,000	3	1,400,000,000	3	1,900,000,000	3	1,900,000,000	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Laporan	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Laporan	0	0	3	1,275,000,000	3	1,275,000,000	3	1,375,000,000	3	1,800,000,000	3	1,800,000,000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan	Laporan	4	1	1	80,000,000	1	80,000,000	1	85,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		hasil Perkebunan														
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan SDG hewan oleh kelompok ternak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan manfaat	Kelompok	300	300	400	15,580,000,000	402	15,580,000,000	404	15,690,000,000	406	16,080,000,000	408	16,080,000,000	
	Meningkatnya kapasitas kelompok tani dalam tanaman pangan dan hortikultura melalui pengelolaan SDG tumbuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas tentang tanaman pangan dan hortikultura	Kelompok	2	2	10		10		10		10		10		
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2	3	250,000,000	3	250,000,000	3	350,000,000	3	400,000,000	3	400,000,000	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5	4	4	15,330,000,000	4	15,330,000,000	4	15,340,000,000	4	15,680,000,000	4	15,680,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak, dan pakan yang beredar di wilayah kabupaten/ko ta	Jumlah laporan hasil pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, TPT, dan pakan	Laporan	0	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	0	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Lain	Laporan	1	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kot a lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kot a lain	Dosis	6000	4000	6500	200,000,000	6500	200,000,000	7500	250,000,000	10000	350,000,000	10000	350,000,000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya cakupan dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung usaha tani	Presentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik	%	28.56	28.57	28.58	4,800,000,000	28.59	3,750,000,000	28.6	5,800,000,000	28.61	7,300,000,000	28.62	7,300,000,000	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya penyusunan laporan pengembanga n prasarana pertanian	Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian	Laporan	1	1	2	1,100,000,000	2	600,000,000	2	580,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Jumlah laporan pengembangan prasarana perkebunan	Laporan	0	0	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B di Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	0	0	1	500,000,000	1	50,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen	0	0	1	100,000,000	1	50,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	16	15	22	3,700,000,000	19	3,150,000,000	30	5,220,000,000	37	6,700,000,000	37	6,700,000,000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Rehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	8	1	3	600,000,000	1	200,000,000	4	800,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	8	14	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	13	2,600,000,000	12	2,450,000,000	20	3,920,000,000	26	5,200,000,000	26	5,200,000,000	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kasus penyakit hewan dan zoonosis melalui sistem kesehatan hewan yang terpadu	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	236,84	-23.44	-2.04	210,000,000	-4.17	210,000,000	-6.52	250,000,000	-9.3	250,000,000	-12.82	250,000,000	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	2	90,000,000	2	90,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	-	NA	1	60,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	-	1	60,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	NA	1	60,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	2	2	2	60,000,000	2	60,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	2	2	60,000,000	2	60,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya penanganan bencana terhadap sektor pertanian melalui upaya mitigasi dan adaptasi	Persentase Bencana Tanaman pangan dan hortikultura Pertanian yang Tertangani	%		100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	
		Persentase Bencana perkebunan yang Tertangani	%		100	100		100		100		100		100		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura	Laporan	1	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Terlaksananya pengendalian dan penanggulang an bencana perkebunan	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulang an bencana perkebunan	Laporan	1	1	1		1		1		1		1		
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	300	300	600	150,000,000	600	150,000,000	600	150,000,000	600	150,000,000	600	150,000,000	
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	25	25	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan yang efektif	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	16.5	16.5	16.5	500,000,000	19	500,000,000	19	550,000,000	19	550,000,000	19	550,000,000	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Laporan	1	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	17	17	20,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	17	17	125,000,000	17	125,000,000	17	140,000,000	17	140,000,000	17	140,000,000	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	1	NA	1	75,000,000	1	75,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	0	2	2	280,000,000	2	280,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD		72.65	73.15	73.65	19,821,755,295	74.15	19,871,744,295	74.65	20,021,744,295	75.15	20,021,744,295	75.5	20,021,744,295	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		10	9	40,000,000	9	40,000,000	9	40,000,000	9	40,000,000	9	40,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	4,000,000	2	4,000,000	2	4,000,000	2	4,000,000	2	4,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan/dokumen keuangan	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan	Dokumen	1	1	1	17,657,755,295	1	17,707,744,295	1	16,828,744,295	1	17,433,744,295	1	17,433,744,295	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	160	160	152	17,647,755,295	152	17,697,744,295	140	16,818,744,295	145	17,423,744,295	145	17,423,744,295	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	

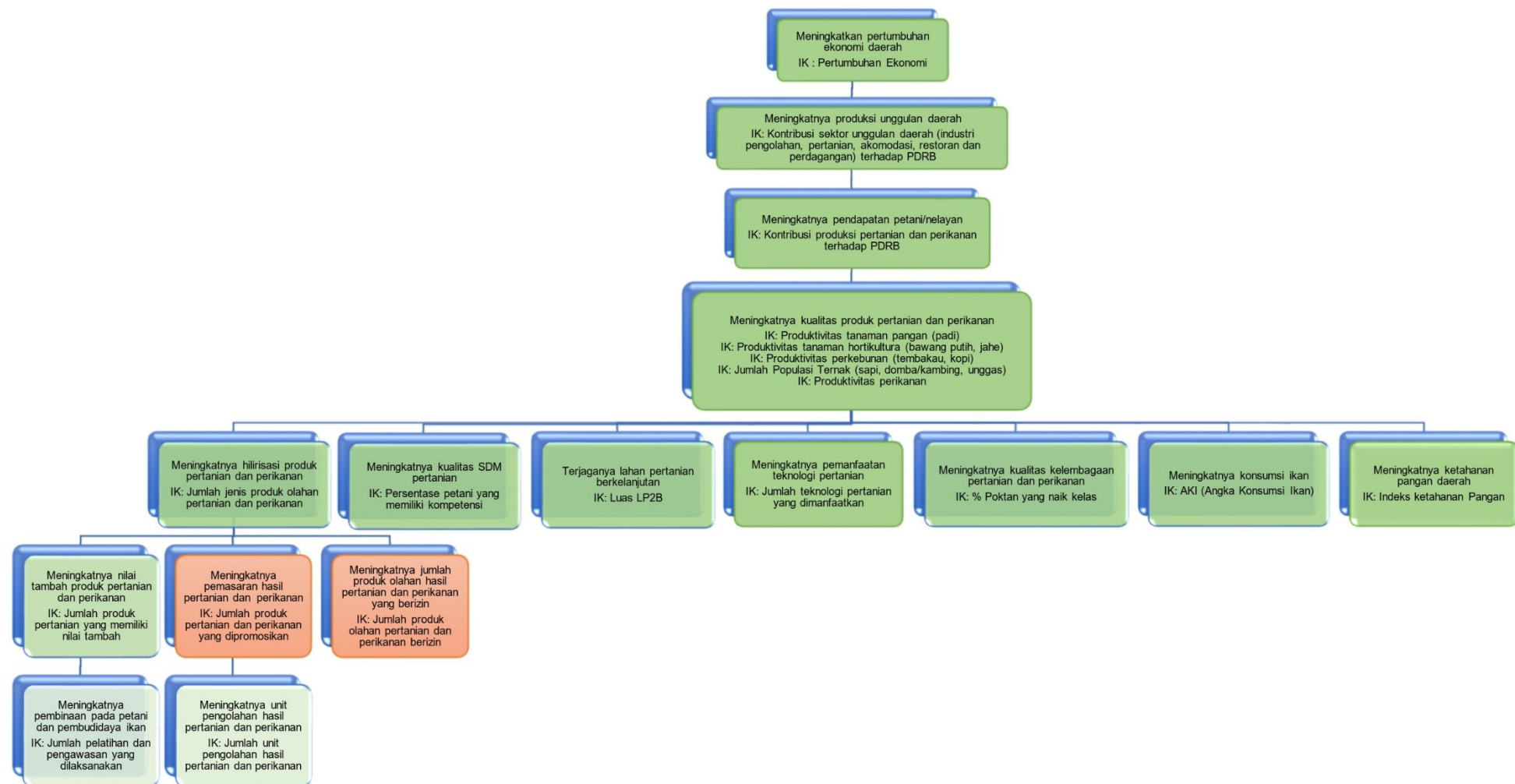
PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah melalui penyusunan laporan/dokumen sesuai ketentuan	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan dan fasilitasi layanan administrasi umum perangkat daerah (sarana prasarana, logistik, rapat/kunjungan, kearsipan, dan dukungan SPBE) sesuai standar.	Jumlah Paket/Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan/Te rlaksana	Dokumen	10	10	10	348,000,000	10	348,000,000	10	376,000,000	10	376,000,000	10	376,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	5	30,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	35,000,000	5	35,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	

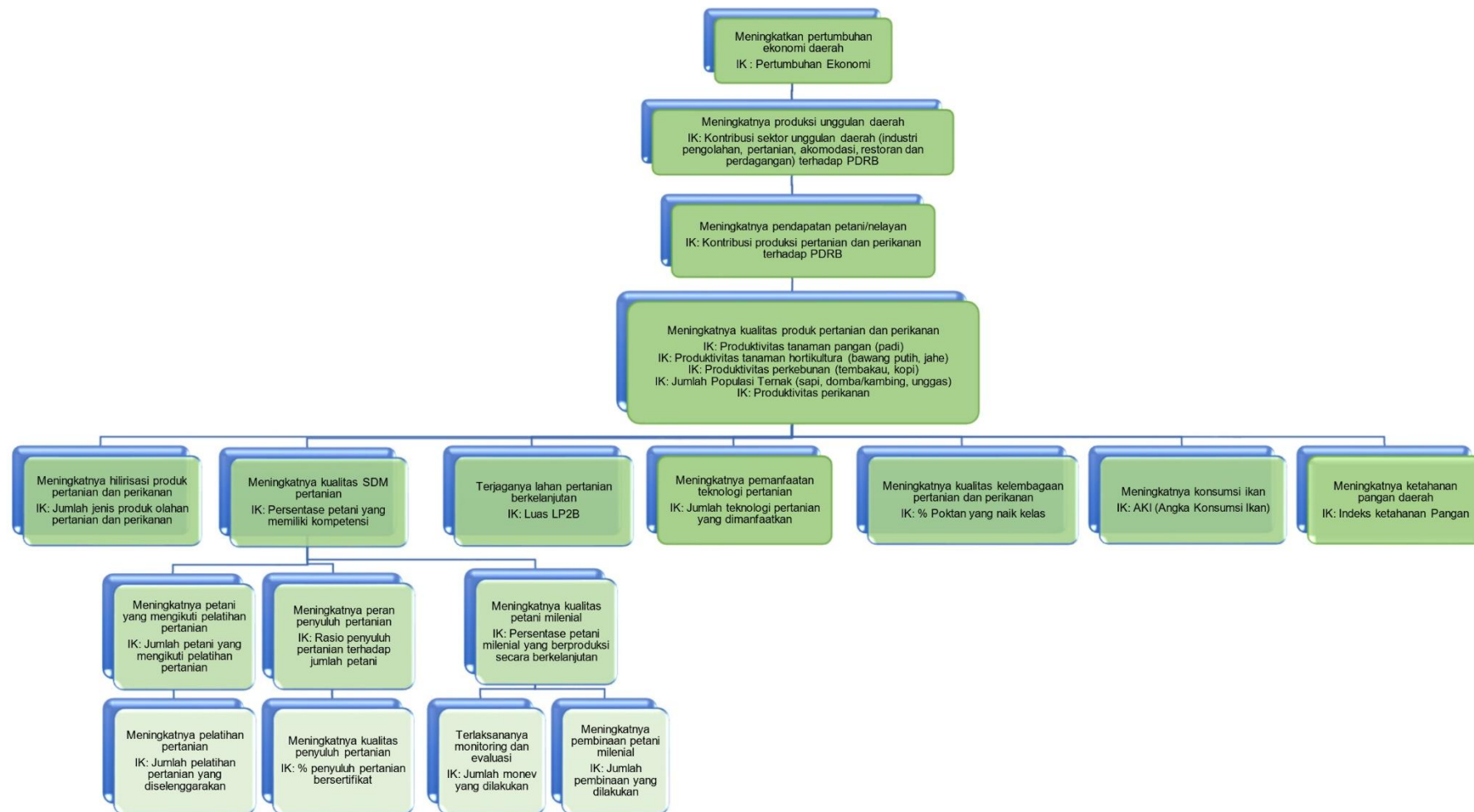
PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	12	250,000,000	12	250,000,000	12	260,000,000	12	260,000,000	12	260,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	5	1	3	30,000,000	3	30,000,000	37	900,000,000	29	295,000,000	29	295,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	0	-	2	700,000,000	4	120,000,000	4	120,000,000	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	0	-	25	100,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	3	30,000,000	3	30,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	2	3	1,461,000,000	3	1,461,000,000	3	1,532,000,000	3	1,532,000,000	3	1,532,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	1	1,000,000	1	1,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	12	160,000,000	12	160,000,000	12	180,000,000	12	180,000,000	12	180,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	12	12	1,300,000,000	12	1,300,000,000	12	1,350,000,000	12	1,350,000,000	12	1,350,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan.	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	31	31	33	220,000,000	33	220,000,000	43	280,000,000	43	280,000,000	43	280,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	12	170,000,000	12	170,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	15	20	20	25,000,000	20	25,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	

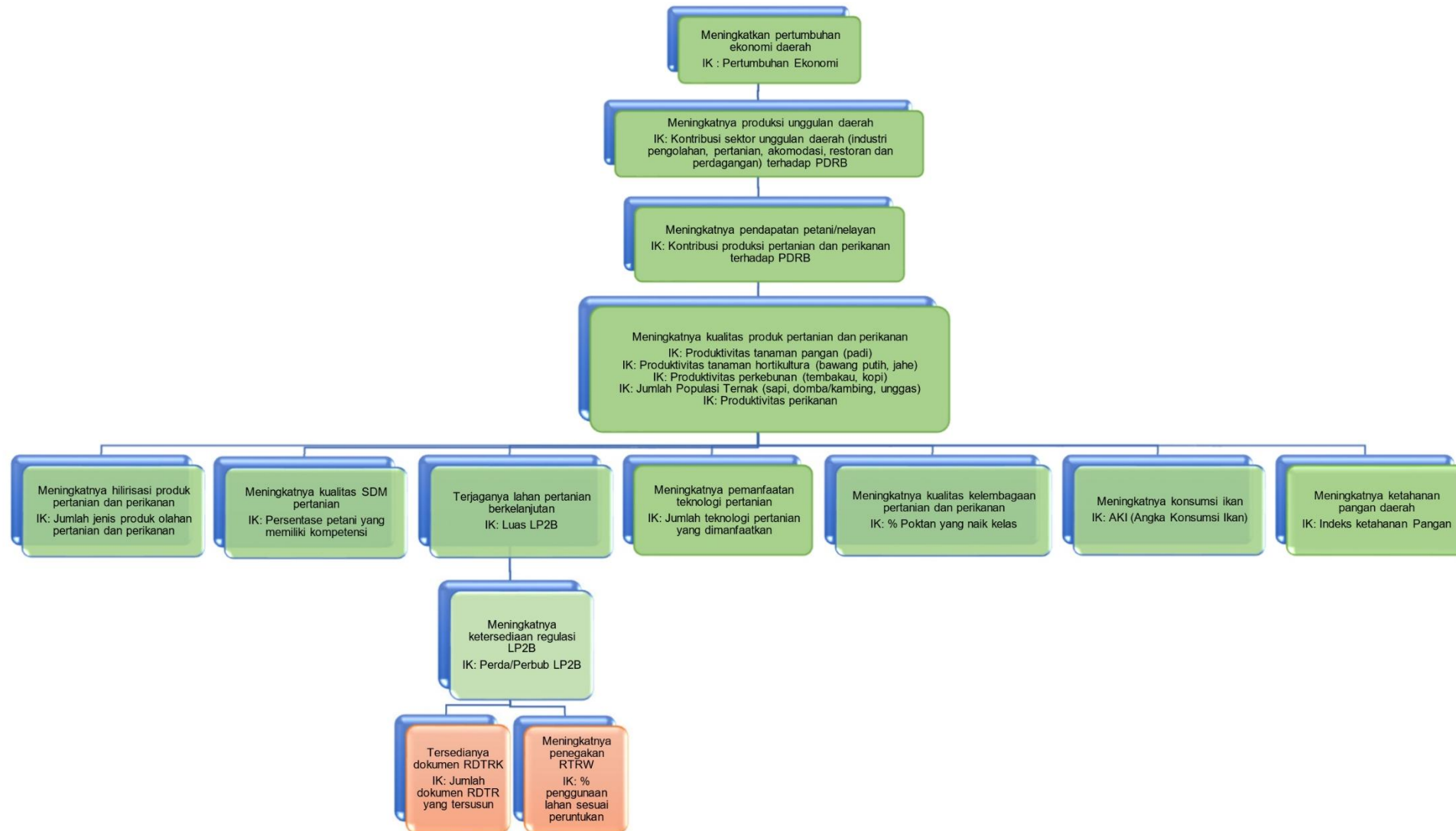
PROGRAM / KEGIATAN / SUB K	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	BASE LINE 2025	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		KET.
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		yang Dipelihara														
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	



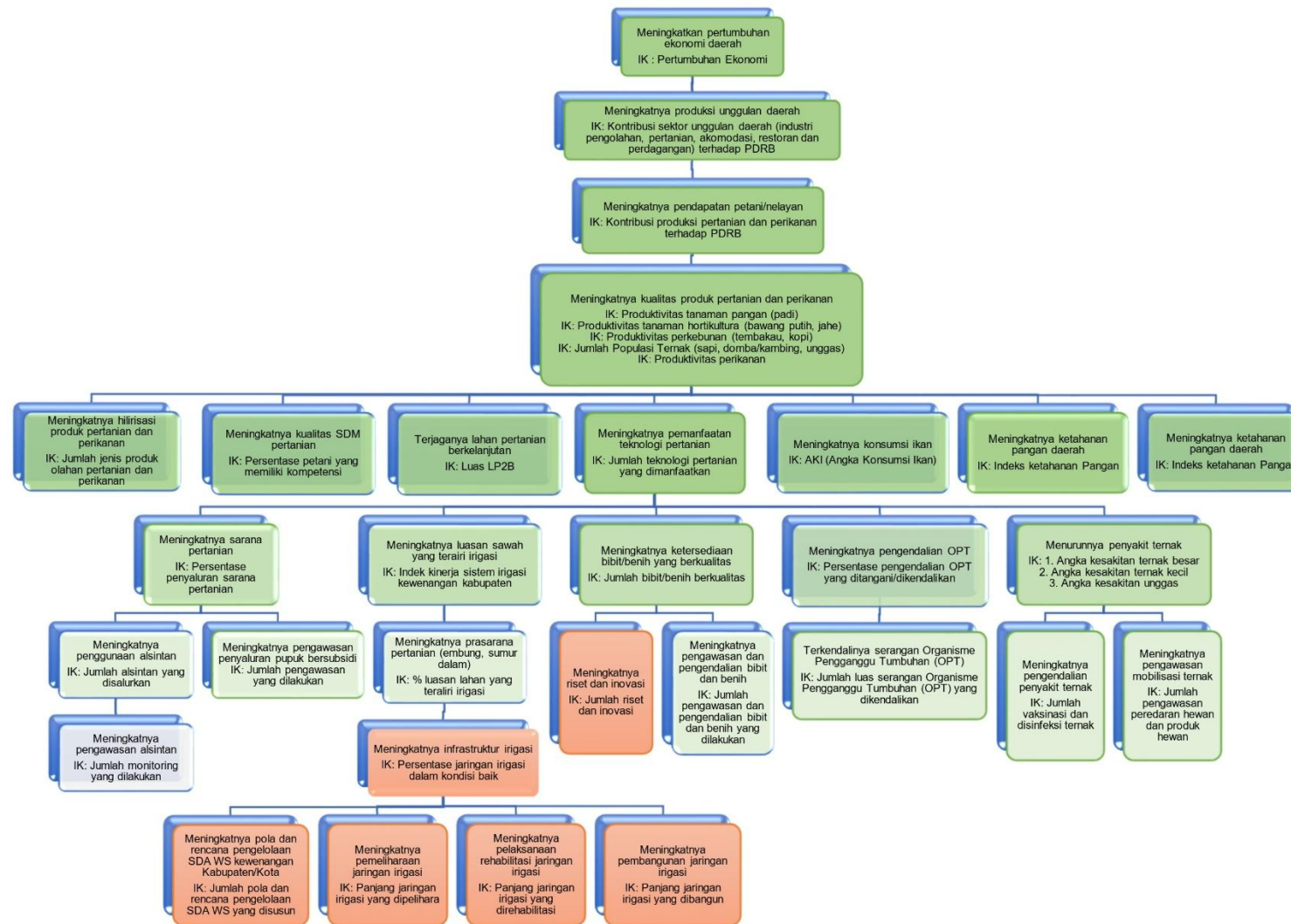
Gambar 4.1 Pohon Kinerja Dispersan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 1)



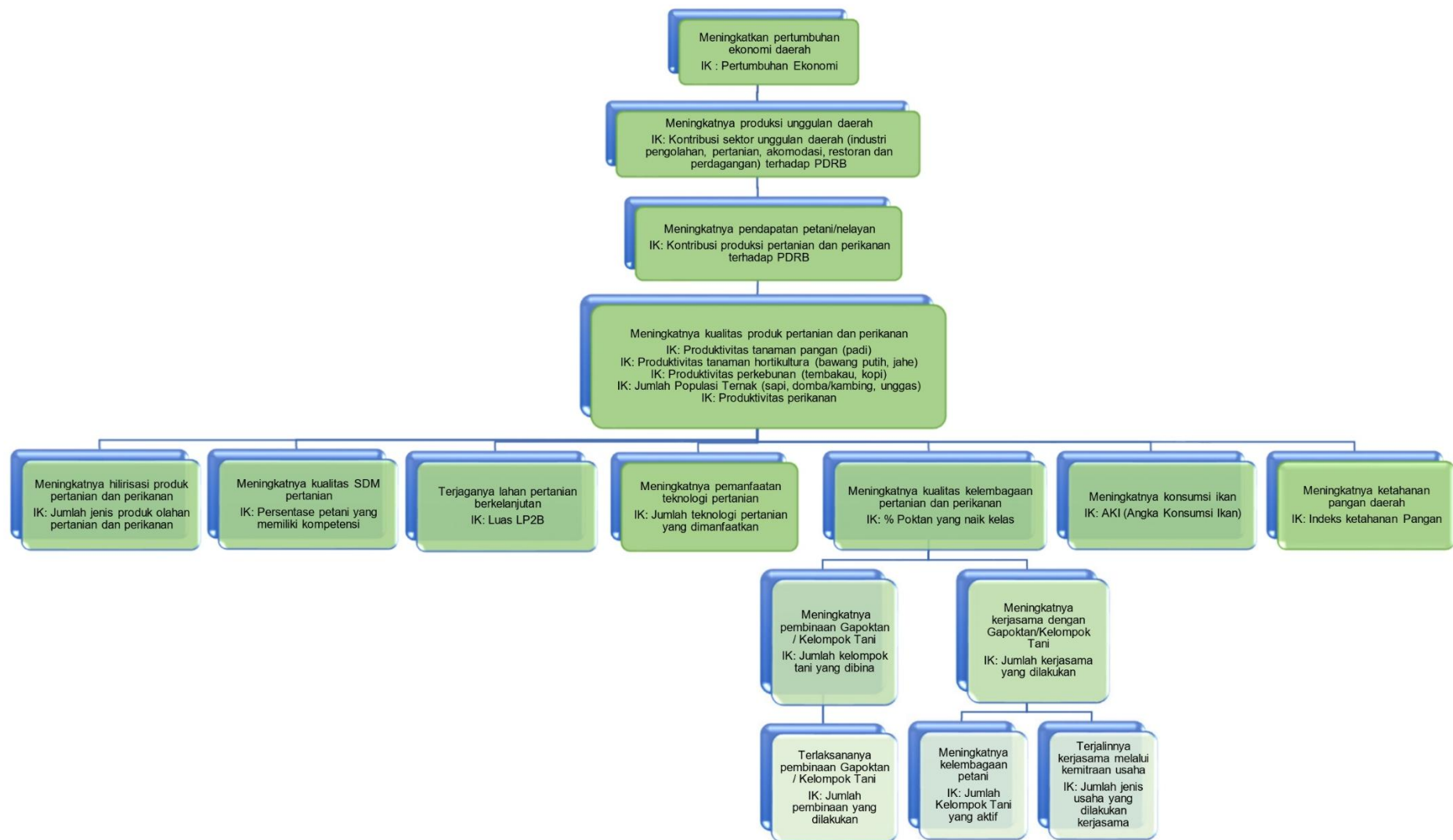
Gambar 4.2 Pohon Kinerja Dispartan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 2)



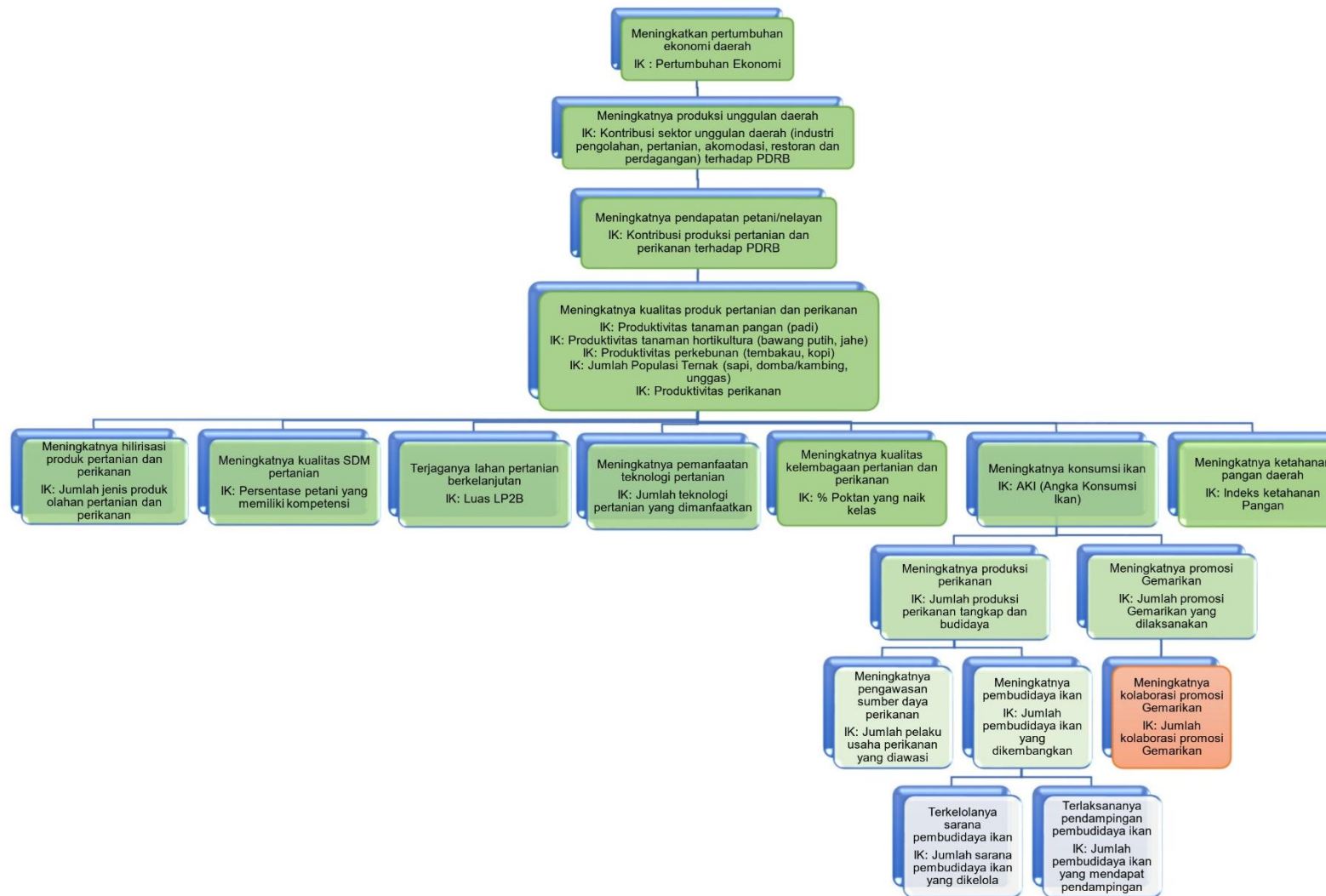
Gambar 4.3 Pohon Kinerja Dispersan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 3)



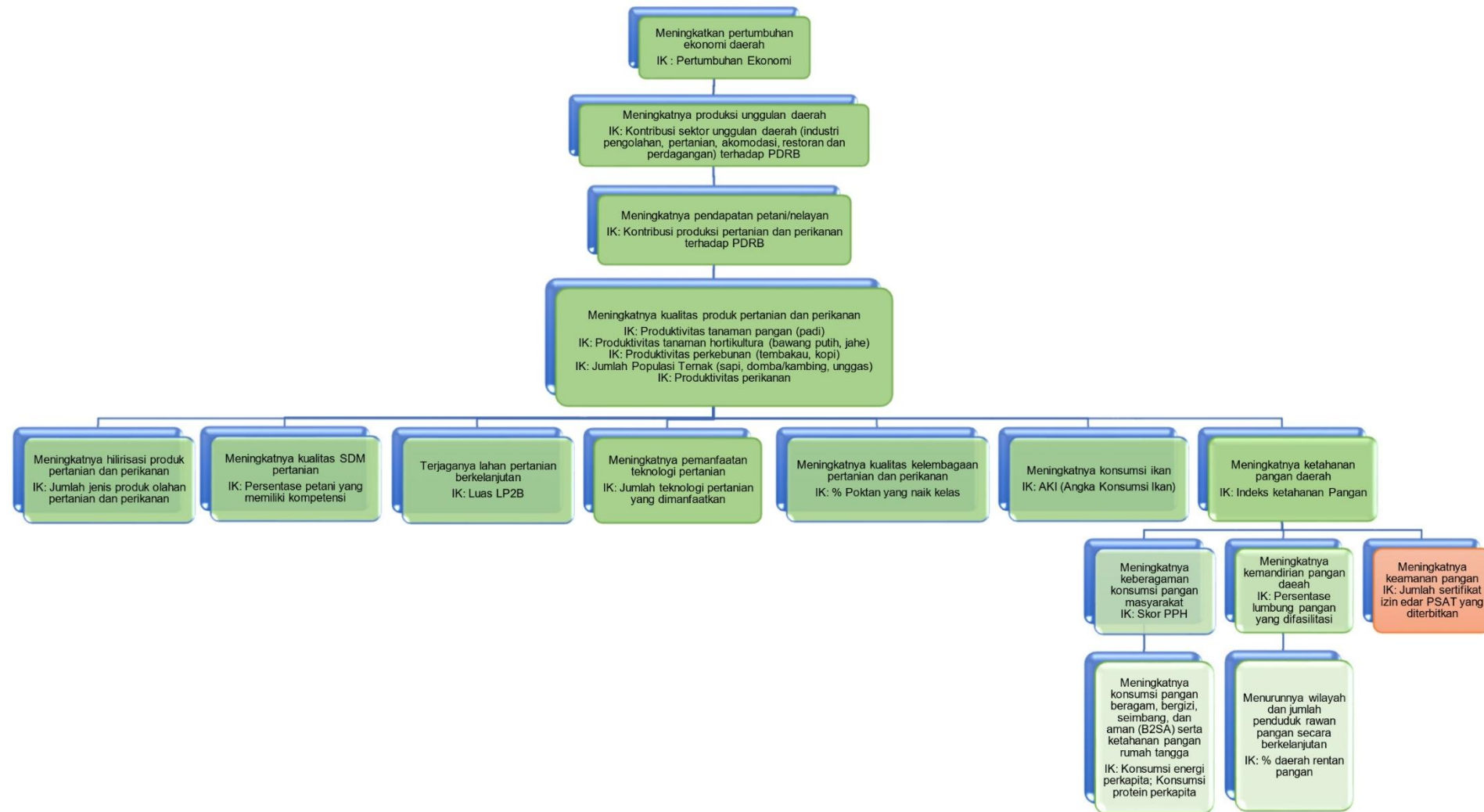
Gambar 4.4 Pohon Kinerja Dispersed Agriculture PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 4)



Gambar 4.5 Pohon Kinerja Dispartan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 5)



Gambar 4.6 Pohon Kinerja Dispartan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 6)



Gambar 4.7 Pohon Kinerja Dispersan PP Kabupaten Karanganyar (Bag. 7)

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya wilayah dan jumlah penduduk rawan pangan secara berkelanjutan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terjaminnya keamanan pangan dari hulu ke hilir demi perlindungan kesehatan masyarakat	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan darat	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Meningkatnya Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, tanaman hias, tanaman biofarmaka)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
		Meningkatnya produksi unggulan komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Tebu) dalam tahun n	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
		Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar Sapi, Ternak Kecil Kambing dan Domba serta unggas)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya cakupan dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung usaha tani	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kasus penyakit hewan dan zoonosis melalui sistem kesehatan hewan yang terpadu	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya penanganan bencana terhadap sektor pertanian melalui upaya mitigasi dan adaptasi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
		melalui penyuluhan yang efektif		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
			Pengolahan Data Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berikut ini dukungan Dispersi PP Kabupaten Karanganyar pada 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota:

Tabel 4.4.

Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No.	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
1	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan • Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota • Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota • Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi • Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan • Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota • Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Pangan
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pertanian

No.	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
	standar rumah pemotongan hewan	• Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi • Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian • Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan • Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan • Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura • Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang • Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan • Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota • Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman • Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain • Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian • Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya • Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota • Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian • Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani • Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan • Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner • Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	

No.	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan • Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa • Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota • Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil • Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil • Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha • Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota • Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil • Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Perikanan dan kelautan

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable,*

Relevant, dan Time-bound) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dispertan PP Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Dispertan PP

No	Indikator	Formula	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan (9 kelompok pangan: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan buah-buahan lainnya)	Skor	97,41	97,42	97,43	97,44	97,45	97,46	97,47	97,47	
2	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (tangapan nelayan di perairan umum darat meliputi sungai, rawa, dan genangan air lainnya) ditambah Produksi Perikanan Budidaya (produksi ikan konsumsi yang diusahakan melalui pembudidayaan yang berasal dari kolam, keramba, mina padi dan tambak)	Ton	2.467,98	2.488,7	2.509.62	2.530,75	2.552,07	2.573,6	2.595,33	2595,33	
3	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Per Hektar per Tahun dibagi Luas panen (Padi, Jagung dan Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar))	Ton/Ha/Tahun	7,69	7,70	7,71	7,72	7,73	7,74	7,75	7,75	
	- Padi	Jumlah Produksi padi per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	6,223	6,224	6,225	6,226	6,227	6,228	6,229	6,229	
	- Jagung	Jumlah Produksi jagung per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	7,1	7,11	7,12	7,15	7,17	7,18	7,19	7,19	

No	Indikator	Formula	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	- Kacang tanah	Jumlah Produksi kacang tanah per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	2,10	2,10	
	- Ubi Kayu	Jumlah Produksi ubi kayu per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	37,84	37,88	37,90	37,92	37,97	37,99	38,01	38,01	
	- Ubi jalar	Jumlah Produksi ubi jalar per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/Tahun	44,82	44,83	44,85	44,86	44,87	44,89	44,9	44,9	
	Produksi Daging	Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik)	Kg	9.310.243	9.333.519	9.356.794	9.380.070	9.403.345	9.426.621	9.449.897	9.449.897	
	Produksi Telur	Jumlah Produksi Telur (Ayam Petelur, Ayam Buras, Bebek, Puyuh)	Kg	23.704.750	23.764.012	23.823.274	23.882.536	23.941.798	24.001.059	24.060.321	24.060.321	
	Produksi Susu	Jumlah Produksi Susu (Sapi dan Kambing)	liter	193.970	194.455	194.940	195.425	195.910	196.395	196.880	196.880	
4	Nilai IKM	Hasil survei	Indeks	80,325	80,80	81,30	81,80	82,30	82,80	83,30	83,30	

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis DISPERTAN PP Kabupaten Karanganyar selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) DISPERTAN PP Kabupaten Karanganyar:

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Urusan Pangan										
1	Persentase Cadangan Pangan	%	-	17,90	20,18	22,38	24,28	26,55	28,83	28,83	
	Urusan Kelautan dan Perikanan										
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	2.467,977	2.488,70	2.509,62	2.530,75	2.552,07	2.573,60	2.595,33	2.595,33	
	Urusan Pertanian										
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton/Ha/Tahun	7,69	7,70	7,71	7,72	7,73	7,74	7,75	7,75	
4	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	236,84	-23,00	-4,08	-2,12	-2,17	-2,22	-2,27	-2,27	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dispertan PP Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dispertan PP Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dispertan PP Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dispertan PP akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dispertan PP Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2030.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko

Dokumen Renstra Dispertan PP menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

